RENCANA STRATEGIS

2025–2029

BALAI BESAR POM DI SAMARINDA









KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
NOMOR HK.02.02.18A.12.25.237 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Kedua huruf a Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Samarinda tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI SAMARINDA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI SAMARINDA TAHUN 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai Besar POM POM di Samarinda memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Samarinda untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Samarinda sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

a. acuan bagi Balai Besar POM di Samarinda dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Samarinda.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal : 5 Desember 2025
Kepala Balai Besar POM di Samarinda



AGUNG KURNIAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Renstra ini merupakan pedoman dan arah kebijakan Balai Besar POM di Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait.

Penyusunan Renstra ini dilandasi oleh semangat untuk mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif, responsif, adaptif, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan strategis, kemajuan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap jaminan mutu dan keamanan produk yang beredar.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Renstra ini, baik dari unsur internal maupun pemangku kepentingan eksternal, yang telah memberikan masukan, dukungan, serta komitmen untuk bersama-sama memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda.

Semoga Renstra Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi acuan strategis bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan, serta menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

Samarinda, 05 Desember 2025
Kepala Balai Besar POM di Samarinda



Agung Kurniawan, ST.
NIP. 19820216 200501 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1 KONDISI UMUM	1
	I.2 POTENSI PERMASALAHAN	58
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	105
	II.1 VISI	105
	II.2 MISI	106
	II.3 TUJUAN	109
	II.4 SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	112
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	129
	III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL RPJMN 2025-2029 DI BIDANG KESEHATAN	129
	III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM DI SAMARINDA	133
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	140
	IV.1 TARGET KINERJA	140
	IV.2 KERANGKA PENDANAAN	143
BAB V	PENUTUP	145
LAMPIRAN	MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBPOM DI SAMARINDA	

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Samarinda Tahun 2020-2024 8

1.2 Jumlah Pegawai BBPOM di Samarinda Per Jabatan Fungsional 62

2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029 111

2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Samarinda periode 2025-2029 118

2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Samarinda 123

3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029 132

3.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Samarinda 2025-2029 135

4.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja tahun 2025 – 2029 140

4.2 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Samarinda 2025-2029 Berdasarkan Program 144

4.3 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Samarinda 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana 144

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1.1 Cakupan Pengawasan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2

1.2 Nilai Kinerja BBPOM di Samarinda Tahun 2020 – 2024 7

1.3 Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020–2024 14

1.4 Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 – 2024 15

1.5 Capaian Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarka hasil pengawasan Tahun 2020 – 2024 16

1.6 Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarka hasil pengawasan Tahun 2020 – 2024 17

1.7 Capaian Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 – 2024 18

1.8 Capaian Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2020 – 2024 20

1.9 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024 22

1.10 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024 23

1.11 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di SamarindaTahun 2020 – 2024 24

DAFTAR GAMBAR

1.12 Capaian Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di SamarindaTahun 2020 – 2024 26

1.13 Capaian Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2020 – 2024 28

1.14 Capaian Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024 29

1.15 Capaian Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 – 2024 30

1.16 Capaian Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 – 2024 31

1.17 Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020 – 2024 33

1.18 Capaian Kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2020 – 2024 34

1.19 Capaian Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024 36

1.20 Capaian Kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 – 2024 37

1.21 Capaian Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020 – 2024 38

1.22 Capaian Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2020 – 2024 39

1.23 Capaian Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai standar Tahun 2020 – 2024 40

DAFTAR GAMBAR

1.24 Capaian Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai standar Tahun 2020 – 2024 41

1.25 Capaian Kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024 43

1.26 Capaian Kinerja Indeks RB Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2020 – 2024 45

1.27 Capaian Kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2020 – 2024 46

1.28 Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2020 – 2024 48

1.29 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2020 – 2024 49

1.30 Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2020 – 2024 50

1.31 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2020 – 2024 51

1.32 Wordcloud dari hasil survei kepada masyarakat 55

1.33 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat 56

1.34 Indeks RB BBPOM di Samarinda 2020-2024 60

1.35 Jumlah Pegawai Struktural, Pelaksana dan Fungsional BBPOM di Samarinda 62

1.36 Indeks Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Samarinda tahun 2020-2024 78

1.37 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM di Samarinda tahun 2020-2024 79

1.38 Matriks Ringkasan Analisis SWOT 104

DAFTAR GAMBAR

2.1 Visi 105

2.2 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita) 107

BAB I

PENDAHULUAN

- *Kondisi Umum*
- *Potensi Permasalahan*

I.1 KONDISI UMUM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. BPOM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM juga memainkan peran penting dalam menjaga keamanan pangan. Pengawasan terhadap produk makanan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat bebas dari

kontaminasi dan bahan berbahaya. Hal ini sangat penting untuk mencegah wabah penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat secara umum.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda meliputi :



Gambar 1.1 Cakupan Pengawasan Wilayah kerja BBPOM di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Susunan organisasi Balai Besar POM di Samarinda terdiri atas:

a. Kepala;

b. Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada tanggal 29 September 2025, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melantik Bapak Agung Kurniawan, ST sebagai Kepala Balai Besar POM di Samarinda dan telah dilakukan serah terima jabatan pada tanggal 6 Oktober 2025, sehingga struktur oragnisasi Balai Besar POM di Samarinda adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, dilakukan penyederhanaan birokrasi, setiap unit organisasi terdiri dari 2 level struktur dan tim kerja yang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana. Tim kerja terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit organisasi atau jika dibutuhkan dapat berasal dari lintas

Instansi Pemerintah. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk tim kerja dapat dipimpin oleh Ketua Tim. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas :

1. Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
2. Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi secara berkala.
3. Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai UPT Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi

dan distribusi Obat dan Makanan

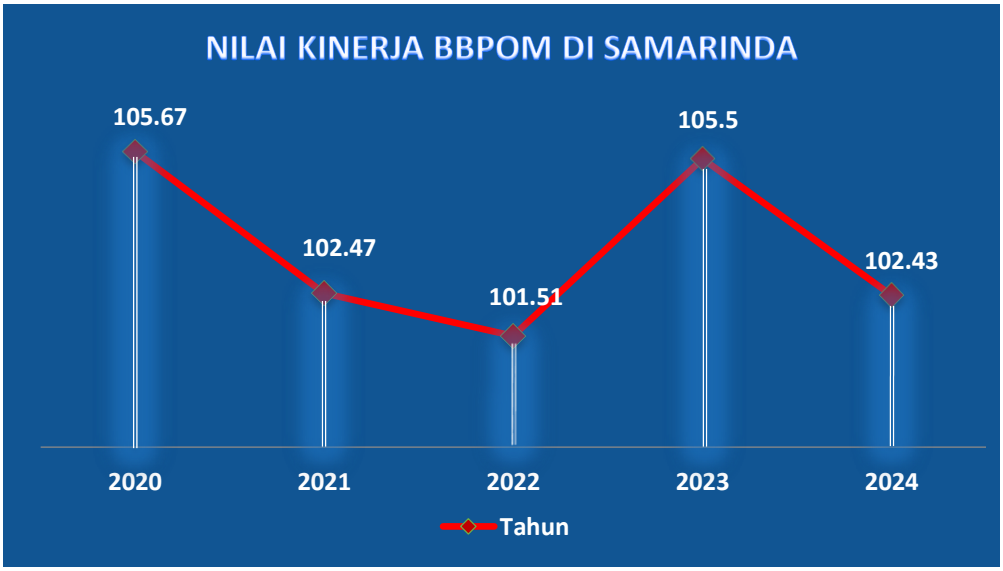
e. Pelaksanaan sampling produk Obat dan Makanan
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Renstra BPOM 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Sejalan dengan itu, dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Samarinda 2025–2029 yang mengacu pada Renstra BPOM 2025-2029 yang merupakan respons terhadap dinamika dan tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra ini tidak hanya disusun untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan saat ini, tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan yang cepat dalam industri obat dan makanan, sehingga BBPOM di Samarinda dapat tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugas pengawasannya. Proses penyusunan Renstra BBPOM di Samarinda didasarkan pada evaluasi capaian kinerja tahun 2020–2024 serta masukan dari berbagai *stakeholder*. Melalui Renstra periode 2025–2029 ini, diharapkan kinerja BBPOM di Samarinda dapat semakin meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

1.1.1. Capaian Kinerja Rencana Strategis BBPOM di Samarinda Tahun 2020 – 2024

Nilai kinerja organisasi BBPOM di Samarinda jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, periode 2020 hingga 2024 nilai kinerja berada di atas 100% dan jika dinilai dengan sesuai kategori masuk dalam kategori Istimewa . Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Samarinda berhasil untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerjanya.



Gambar 1.2 Nilai Kinerja BBPOM di Samarinda Tahun 2020 – 2024

Pengukuran kinerja BBPOM di Samarinda mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu s*takeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*

BBPOM di Samarinda memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 34 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Samarinda Tahun 2020-2024

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda															
IKSK1: Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.00	89.66	96.41	90.00	95.06	105.62	90.50	91.76	101.39	91.00	91.53	100.58	92.50	91.30	98.70
IKSK2: Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.00	73.44	94.15	81.00	92.95	114.75	82.00	84.54	103.10	84.00	91.06	108.40	91.50	93.87	103
IKSK3: Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.00	87.37	98.17	89.50	87.89	98.20	90.00	86.58	96.20	90.50	88.20	97.46	88.50	89.53	101.16
IKSK4: Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.00	68.75	95.49	73.00	87.27	119.55	75.00	87.50	116.67	76.00	86.60	114.21	87.50	90.21	103.10
IKSK5: Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				95.00	92.22	97.07	96.00	93.68	97.58	97.50	100	12.56	96.66	100	103.46
SK 2 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda															
IKSK6: Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73.00	81.06	111.04	84.00	83.27	99.13	86.00	85.72	99.67	89.00	88.76	99.73	88.80	88.98	100.20

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK 3 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda															
IKSK7: Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86.00	83.58	97.19	84.60	94.30	111.47	85.70	95.80	111.79	86.80	92.30	106.34	95.80	97.63	101.91
IKSK8: Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72.00	73.23	101.71	72.65	72.18	99.35	75.11	76.55	101.92	77.56	80.73	104.09	80.80	80.34	99.43
IKSK9: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.00	85.16	96.77	87.00	87.05	100.06	88.00	87.65	99.60	89.00	93.30	104.83	93.75	94.67	100.98
SK 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda															
IKSK10: Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88.00	99.93	113.56	100.00	86.09	86.09	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK11: Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62.00	69.82	112.61	70.00	83.57	119.39	75.00	76.56	102.08	80	87.77	109.71	85.00	85.09	100.11

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK12: Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00	99.07	116.55	99.00	99.73	100.74	99.00	99.87	100.88	100	99.85	99.85	99.90	100.00	100.10
IKSK13: Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	47.00	49.35	105	55.00	53.75	97.73	60.00	67.21	112.02	65.00	77.27	118.88	78.00	74.14	95.05
IKSK14: Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	78.26	130.43	78.00	76.23	97.73	81.00	77.91	96.19	83.00	84.58	101.90	85.00	89.32	105.08
IKSK15: Indeks Pelayanan Publik	3.51	4.21	119.94	4.35	4.44	102.07	4.45	4.33	97.30	4.25	4.54	106.82	4.60	4.87	105.87
IKSK16: Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							77.00	77.78	101.01	79.00	90.48	114.53	91.00	91.23	100.25
IKSK17: Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten /Kota													95.00	100.00	105.26

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK 5 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda															
IKSK18: Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.15	91.42	102.55	92.70	92.10	99.35	94.60	92.20	97.46	96.50	97.33	100.86	98.20	98.26	100.06
IKSK19: Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16.00	19.00	118.75	40.00	58.00	145	68.00	77.00	113.24	84.00	93.00	110.71	100.00	103.00	103
IKSK20: Jumlah desa pangan aman	5.00	5.00	100	12.00	12.00	100	18.00	18.00	100	25.00	25.00	100	31.00	31.00	100
IKSK21: Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3.00	3.00	100	4.00	4.00	100	6.00	6.00	100	8.00	8.00	100	10.00	10.00	100
SK 6 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda															
IKSK22: Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.00	94.46	104.96	100	96.96	96.96	100	93.38	93.38	100	100	100	100	100	100
IKSK23: Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80.00	92.77	115.96	100	95.11	95.11	100	98.44	98.44	100	100	100	100	100	100
SK 7 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda															
IKSK24: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89	136.43	153.29	97	112.5	115.98	98	100	102.04	99	100	101.01	100	100	100
SK 8 : Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Samarinda yang optimal															
IKSK25: Indeks RB Balai Besar POM di Samarinda	90.00	77.63	86.256	80.10	80.14	100.05	81.10	86.94	107.20	82.10	87.79	106.931	90.25	88.24	97.77

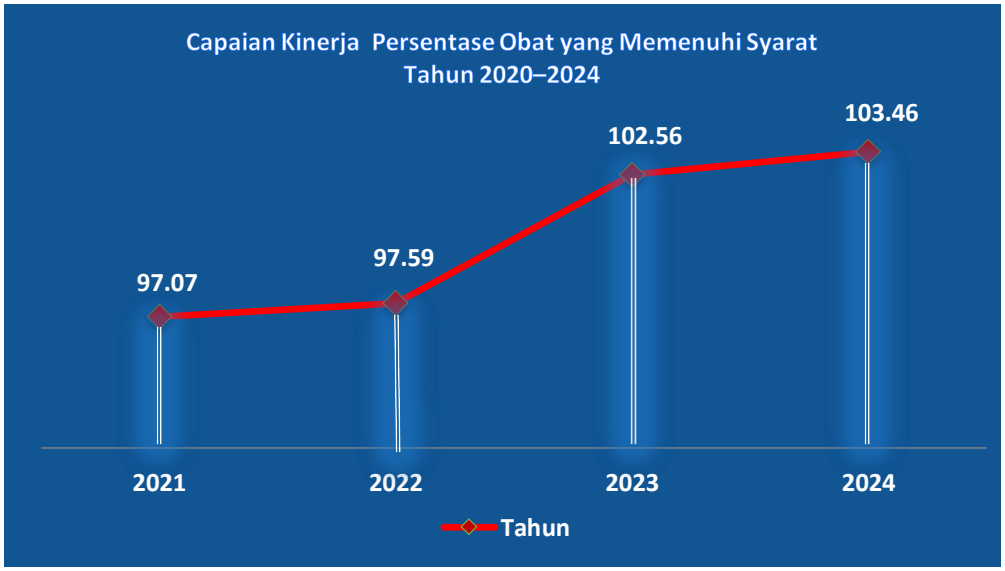
IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK26: Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	81.00	80.10	98.889	82.60	79.33	96.041	85.10	80.15	94.183	87.60	81.98	93.5845	83.39	83.51	100.10
IKSK27: Nilai Pengelolaan Kearsipan													92.35	92.99	100.70
SK 9 : Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Samarinda yang berkinerja optimal															
IKSK28: Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Samarinda	75.00	85.17	113.56	84.50	84.74	100.28	84.75	85.17	100.50	85	90.94	106.988	90.59	86.71	95.72
SK 10 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan															
IKSK29: Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76.00	63.40	83.42	75.00	75.33	100.44	80.00	81.17	101.46	85.00	80.99	95.28	82.08	85.63	104.30
IKSK30: Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Samarinda yang optimal	1.51	1.95	129.14	2.00	2.00	100	2.25	3.00	133.33	2.50	3.00	120	3	2.90	96.67
SK 11 : Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Samarinda secara Akuntabel															
IKSK31: Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	93.00	92.35	99.301	93.10	89.34	95.961	93.70	88.82	94.792	94.90	90.13	94.9737	90.58	97.40	107.50
IKSK32: Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													95.55	100.00	104.70
IKSK33: Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													93.00	98.58	106

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK34: Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri													60.00	54.89	91.48

1. **Sasaran Kegiatan (SK1)**

   Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda

   Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Samarinda merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1)Persentase Obat yang memenuhi syarat; (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; dan (5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.



Gambar 1.3 Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020–2024

Pada Grafik diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja masih berada di atas 95% selama lima tahun terakhir, yang mencerminkan **konsistensi pengawasan mutu obat** oleh Balai Besar POM di Samarinda. Pada tahun 2021, capaian mencapai **105,62%**, melebihi target 100%. Hal ini mencerminkan

peningkatan efektivitas program pengawasan, atau kemungkinan adanya koreksi dari baseline target sebelumnya. Setelah puncaknya di 2021, capaian menurun secara bertahap hingga 98,71% di 2024. Meskipun masih tinggi, tren ini menunjukkan **potensi tantangan** seperti: Masih rendahnya Tingkat kepatuhan produsen terhadap pemenuhan ketentuan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik, Peredaran produk di wilayah pengawasan BBPOM di Samarinda masih terdapat produk Kosmetik dan Obat Tradisional yang tidak terjamin mutunya, masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha Kosmetik terhadap pemenuhan syarat CPKB terutama persyaratan penandaan, Pendaftaran produk kosmetik yang tidak dilakukan pengawasan pre market yang menyebabkan adanya ketidaksesuian produk dipasaran dari segi mutu maupun penandaannya dan keterbatasan sumber daya.

Penurunan kecil tapi konsisten ini bisa menjadi dasar untuk **evaluasi strategi pengawasan** agar kinerja tidak terus menurun. Intervensi berbasis data bisa dipertimbangkan, seperti peningkatan pembinaan terhadap industri farmasi dan penguatan pengawasan post-market.



Gambar 1.4 Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 – 2024

Pada grafik diatas capaian kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM Samarinda tahun 2020–2024 terlihat ada lonjakan signifikan pada tahun 2021, dan meskipun ada fluktuasi setelahnya, capaian tetap berada di atas 100% sejak 2021 hingga 2024.

Dari 2021 hingga 2024, capaian selalu **di atas 100%**, menunjukkan bahwa target kinerja telah terlampaui secara konsisten. Ini menandakan **penguatan sistem pengawasan mutu makanan**, baik dari sisi inspeksi, sampling, maupun pembinaan terhadap pelaku usaha pangan.

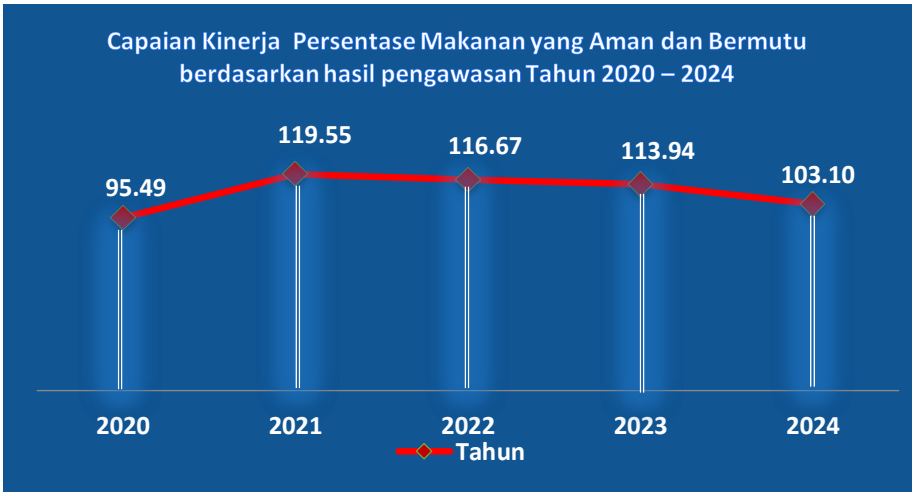


Gambar 1.5 Capaian Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarka hasil pengawasan Tahun 2020 – 2024

Sepanjang tahun 2020–2024, capaian kinerja persentase obat yang aman dan bermutu menunjukkan performa yang stabil dan tinggi, selalu berada di atas angka 96%, yang mencerminkan efektivitas pengawasan mutu obat oleh BBPOM Samarinda. Terjadi penurunan capaian pada tahun 2022 menjadi 96,20%, yang merupakan titik terendah selama lima tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh tantangan eksternal seperti pandemi COVID-19 atau peningkatan pengawasan yang lebih ketat sehingga lebih banyak temuan yang tidak memenuhi syarat. Tahun 2023 menunjukkan pemulihan capaian menjadi

97,46%, yang mengindikasikan adanya upaya perbaikan sistem pengawasan dan peningkatan kualitas produk dari pelaku usaha.

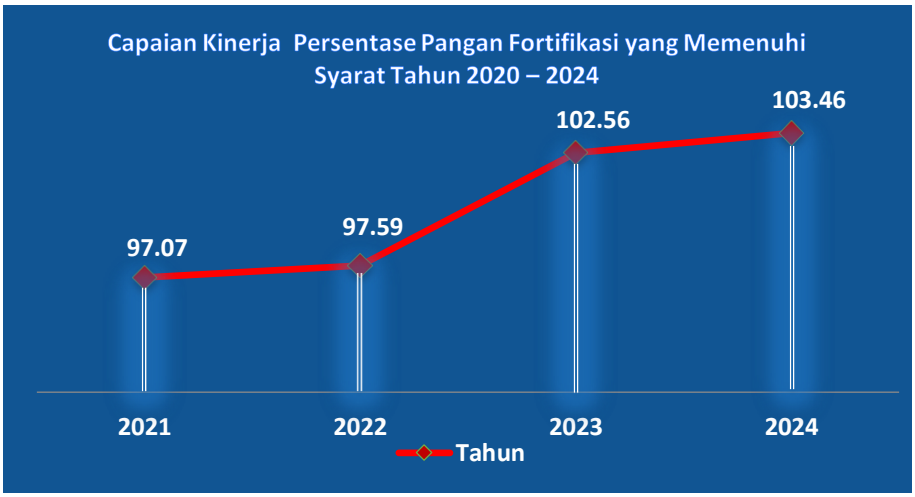
Tahun 2024 mencatat capaian tertinggi sebesar 101,17%, yang menunjukkan bahwa hasil kinerja melampaui target yang ditetapkan, Ini bisa mencerminkan:
Efektivitas pengawasan yang sangat baik dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Meskipun terdapat fluktuasi kecil, tren keseluruhan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan arah positif dan peningkatan mutu secara bertahap, membuktikan komitmen BBPOM Samarinda dalam menjamin keamanan dan mutu obat yang beredar.



Gambar 1.6 Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarka hasil pengawasan Tahun 2020 – 2024

Pada tahun 2020, capaian berada di angka 95,49%, menunjukkan bahwa sebagian target pengawasan makanan aman dan bermutu belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh situasi pandemi dan keterbatasan akses lapangan saat itu. Tahun 2021 mencatat lonjakan capaian hingga 119,55%, diikuti dengan 116,67% pada tahun 2022. Ini menandakan: Penguatan strategi pengawasan pangan,

Peningkatan kepatuhan pelaku usaha pangan. Meskipun ada penurunan bertahap di tahun 2023 (113,94%) dan 2024 (103,10%), kinerja tetap sangat baik karena capaian melebihi 100%. Penurunan ini dapat dipandang sebagai bentuk stabilisasi setelah lonjakan capaian sebelumnya. Empat tahun terakhir menunjukkan tren konsistensi di atas target, yang menjadi indikator keberhasilan BBPOM Samarinda dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian keamanan serta mutu makanan.



Gambar 1.7 Capaian Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 – 2024

Indikator kinerja ini baru mulai pada tahun 2021, capaian berada di angka 97,07%, yang menunjukkan bahwa mayoritas produk pangan fortifikasi telah memenuhi syarat mutu dan keamanan. Tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan menjadi 97,59%, mencerminkan konsistensi dan perbaikan pengawasan serta kepatuhan industri terhadap standar fortifikasi. Capaian tahun 2023 mencapai 102,56%, dan 103,46% pada tahun 2024, menandakan bahwa realisasi melebihi target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan adanya: Penguatan sistem monitoring dan evaluasi, Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam menerapkan

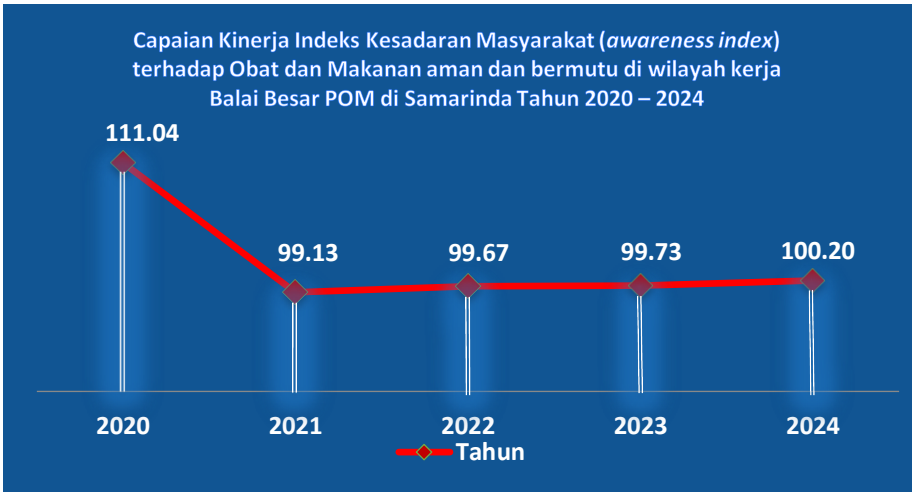
proses fortifikasi yang sesuai standar, dan optimalisasi pembinaan dan edukasi yang diberikan oleh BBPOM di Samarinda kepada produsen. Grafik capaian menunjukkan tren yang terus meningkat dan stabil, dari 97% ke atas 100%, hal ini dapat diartikan bahwa program pengawasan pangan fortifikasi tidak hanya berhasil mempertahankan mutu, tetapi juga telah mencapai dan melampaui ekspektasi kinerja.

Kedepannya diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis risiko agar mutu pangan fortifikasi tetap terjaga meskipun dalam kondisi pasar atau pasokan bahan fortifikan yang berubah-ubah.

2. **Sasaran Kegiatan (SK2)**

   Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda

   Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah, sehingga masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, maka perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Obat dan Makanan yang berkualitas. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 1(satu) indikator kinerja yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda.



Gambar 1.8 Capaian Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2020 – 2024

Tahun 2020 mencatat capaian tertinggi, yakni 111,04%, yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya obat dan makanan yang aman dan bermutu. Hal ini dapat dipengaruhi oleh: Gencarnya edukasi publik saat awal pandemi COVID-19, Publikasi terkait Obat dan Makanan dilakukan rutin melalui media sosial (media elektronik, media cetak dan media luar ruang), sehingga masyarakat meningkat pengetahuannya, ada perubahan sikap dan perilaku sehingga mampu memilih produk aman yang akhirnya meningkatkan indeks kesadaran masyarakat.

Indeks turun signifikan ke 99,13%, yaitu di bawah capaian sebelumnya, meskipun masih sangat dekat dengan target. Penurunan ini diantaranya karena: Berkurangnya intensitas kampanye pasca gelombang awal pandemi, Pergeseran fokus masyarakat ke isu-isu lain, Tantangan adaptasi metode sosialisasi saat pembatasan sosial.Capaian bertahan stabil di 99,67% (2022) dan 99,73% (2023). Ini menunjukkan adanya pemulihan kesadaran masyarakat secara perlahan, meskipun belum melampaui 100%.

Tahun 2024 menunjukkan peningkatan kecil namun penting menjadi 100,20%, yang berarti masyarakat mulai kembali berada pada tingkat kesadaran sesuai harapan. Hal ini mengindikasikan efektivitas program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang dilakukan secara berkelanjutan.

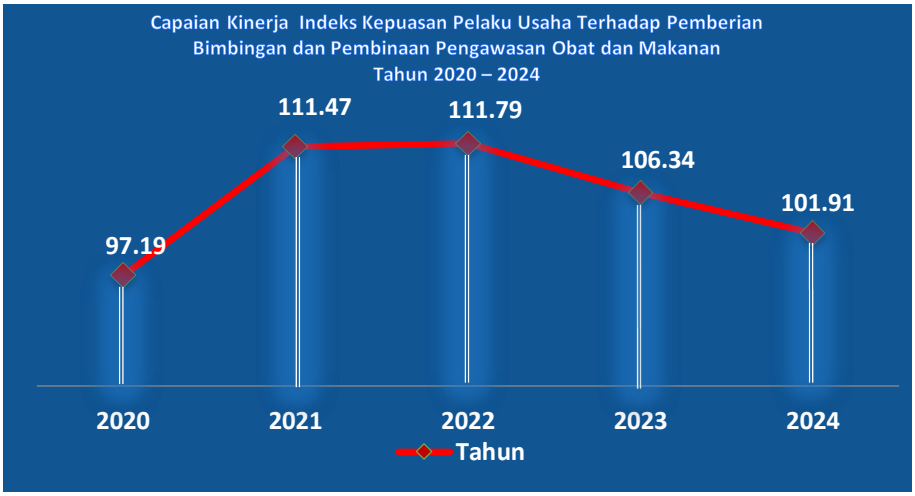
Peran edukasi publik, pengawasan partisipatif, dan kolaborasi lintas sektor kemungkinan menjaga kestabilan capaian.

Awareness index selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi ringan, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih inovatif dan berbasis teknologi digital, perlu terus memperkuat edukasi melalui sekolah, komunitas, dan media sosial, Evaluasi program KIE dilakukan rutin agar pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dan mengubah perilaku masyarakat.

3. **Sasaran Kegiatan (SK3)**

   Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda

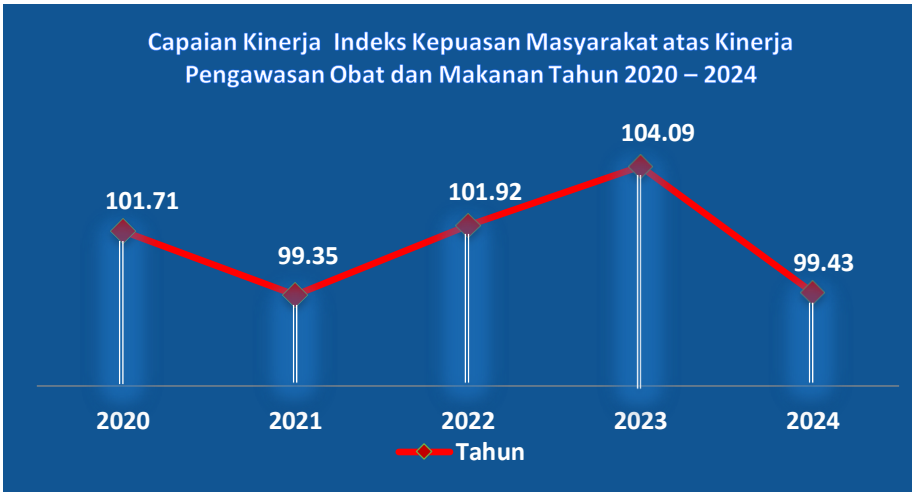
   Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM.



Gambar 1.9 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024

Kepuasan Meningkat Tajam di Tahun 2021 dan 2022, Lonjakan dari **97,19% (2020)** ke **111,47% (2021)** dan **111,79% (2022)** menunjukkan **respon positif pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan**, hal ini dikarenakan Perubahan pendekatan yang lebih partisipatif, Perbaikan kualitas layanan, Adaptasi digitalisasi layanan selama pandemi COVID-19, Pelaksanaan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik dan Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik kepada pelaku usaha UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan juga berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan bagi pelaku usaha. Tahun 2023 turun menjadi 106,34% dan tahun 2024 kembali turun ke 101,91%, akan tetapi Penurunan ini **masih dalam kategori sangat baik**.

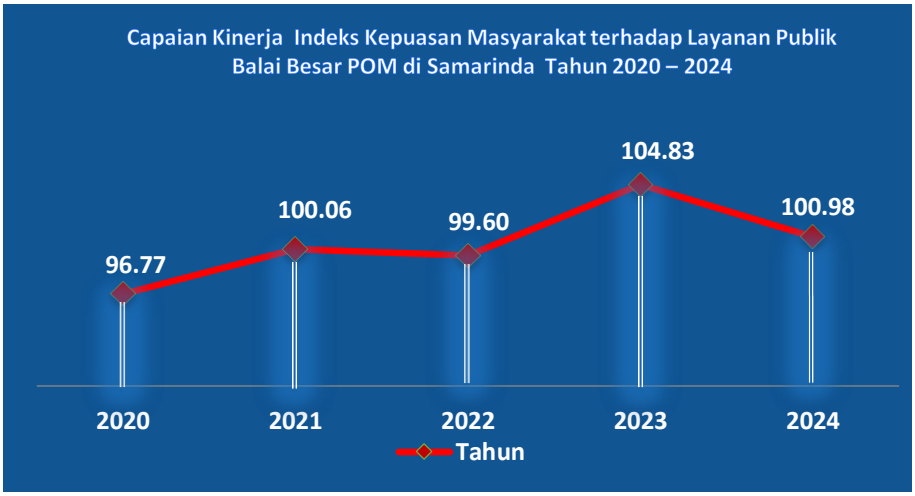
Sejak 2021 hingga 2024, capaian **selalu di atas 100%**, menunjukkan bahwa pelayanan bimbingan & pembinaan masih memenuhi bahkan melampaui ekspektasi pelaku usaha secara umum.



Gambar 1.10 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024

Selama lima tahun, capaian berada dalam rentang **99%–104%**, menunjukkan **stabilitas persepsi positif masyarakat** terhadap pengawasan obat dan makanan. Tahun-tahun dengan capaian di atas 100% menandakan masyarakat menilai pelayanan **melebihi ekspektasi**. **Capaian Tertinggi di Tahun 2023 (104,09%)** disebabkan diantaranya oleh: Peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi publik, respons cepat terhadap isu-isu pengawasan, penguatan kehadiran BBPOM di Samarinda di media sosial dan layanan publik. Penurunan dari 104,09% (2023) ke 99,43% (2024) meskipun kecil, menunjukkan adanya **potensi penurunan kepuasan atau perubahan ekspektasi masyarakat.** Faktor-faktor yang mungkin memengaruhi: Kasus pengawasan yang menonjol di media, Persepsi layanan pengaduan atau tindak lanjut yang kurang optimal, Ketidakpahaman masyarakat terhadap batas peran BBPOM.

Tahun 2021 dan 2024 di Bawah 100%, Meski hanya sedikit, tahun 2021 (99,35%) dan 2024 (99,43%) perlu perhatian agar **tidak menjadi tren penurunan**, ini bisa menjadi indikator awal bahwa **upaya komunikasi publik dan pelayanan langsung perlu ditingkatkan**.



Gambar 1.11 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di SamarindaTahun 2020 – 2024

Tahun 2020 mencatat capaian terendah (**96,77%**), hal ini dikarenakan dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan publik langsung (tatap muka, inspeksi, konsultasi). Namun, **perbaikan cepat terjadi di tahun 2021 (100,06%)**, yang mencerminkan adaptasi BBPOM di Samarinda dalam menyesuaikan layanan, diantaranya seperti penggunaan teknologi digital dan sistem antrian online.

Puncak Kepuasan Masyarakat terjadi di Tahun 2023, Indeks mencapai **104,83%**, menjadi puncak tertinggi selama lima tahun terakhir, Hal ini menunjukkan **layanan publik dianggap sangat memuaskan**, diantaranya Penguatan layanan konsultasi, Transparansi proses layanan (izin edar, informasi publik), Pelayanan prima berbasis zona integritas WBK/WBBM, Kemudahan Persyaratan Pendaftaran, Waktu dan Biaya Tarif Izin Edar BPOM dengan membantu UMKM dalam pengurusan izin edar melalui pendampingan SI Jebol, JJS (Jum'at Jumpa Si Jebol), Peningkatan penanganan pengaduan dan tindak lanjut yang disampaikan dan ditindaklanjut sesuai timeline/SLA.

Capaian Tahun 2024 Masih Sangat Baik, meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, capaian **100,98% tetap menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi** dan telah melampaui target (100%).

Sejak tahun 2021 hingga 2024, indeks berada **konsisten di atas 99%**, mencerminkan bahwa pelayanan publik di BBPOM Samarinda sudah berjalan dengan **tingkat kepuasan yang sangat stabil dan professional.**

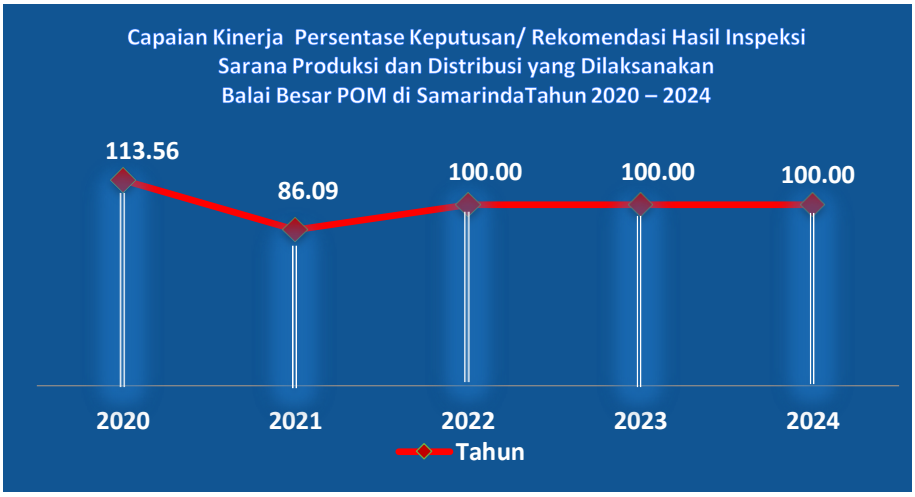
Upaya upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kualitas pelayanan dengan memperkuat aspek kecepatan layanan, keterbukaan informasi, serta keramahan dan kompetensi petugas, melakukan evaluasi berkala terhadap umpan balik masyarakat**,** terutama saat indeks turun, agar bisa dilakukan perbaikan cepat, membuat inovasi layanan publik digital**,** khususnya dalam pelayanan perizinan, pengaduan masyarakat, dan edukasi konsumen.

4. Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BBPOM di Samarinda mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Samarinda, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Samarinda akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Samarinda mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase

keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (6) Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan; (7) Persentase UMKM yang Memenuhi Standar produksi pangan olahan da/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik; dan (8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.



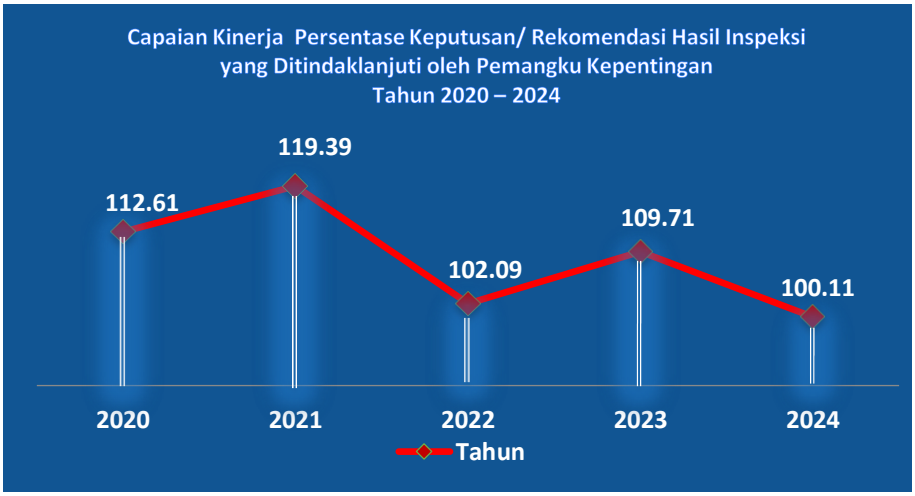
Gambar 1.12 Capaian Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di SamarindaTahun 2020 – 2024

Capaian Sangat Tinggi di Tahun 2020 (113,56%) melebihi target secara signifikan, hal ini disebabkan diantaranya oleh Intensifikasi inspeksi pasca pandemi awal, Monitoring dan evaluasi terhadap hasil kegiatan pengawasan sarana produksi maupun distribusi telah dilaksanakan secara optimal,

Komunikasi yang lebih intensif antara Pusat, UPT lain maupun pemangku kepentingan oleh UPT agar pengawasan Obat dan makanan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

Capaian menurunan Tajam di Tahun 2021 (86,09%) Ini merupakan capaian terendah dalam periode lima tahun. Penurunan ini dikarenakan hal-hal berikut antara lain: adanya pembatasan aktivitas lapangan akibat gelombang pandemi COVID-19, keterbatasan sumber daya inspektur, penundaan tindak lanjut keputusan/rekomendasi.

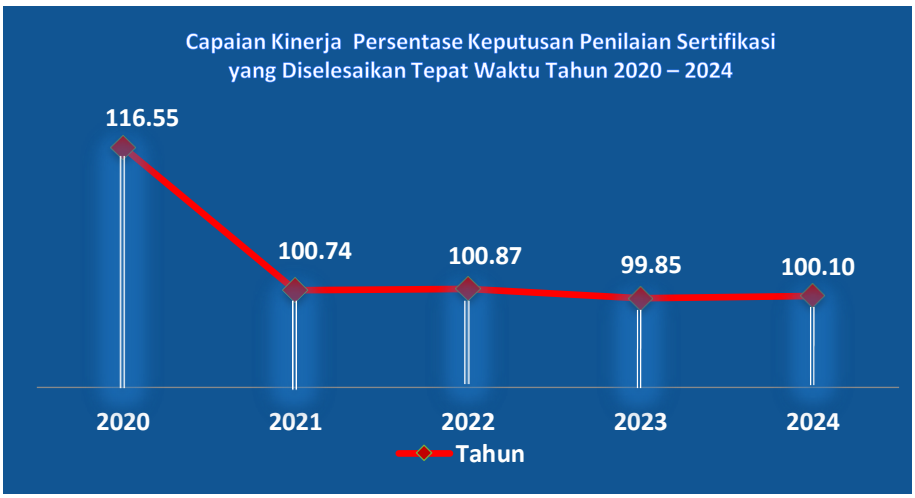
Mulai tahun 2022 hingga tahun 2024, capaian **kembali stabil pada 100%** Ini menunjukkan bahwa **mekanisme inspeksi dan tindak lanjut rekomendasi telah kembali normal dan optimal**. Bisa juga mencerminkan perbaikan dalam sistem manajemen pengawasan dan pelaporan. Capaian 100% Selama 3 Tahun Berturut-Turut (2022–2024) Menunjukkan bahwa **target keputusan dan rekomendasi dari hasil inspeksi telah dicapai sepenuhnya** selama periode tersebut, ini merupakan indikator bahwa Balai Besar POM di Samarinda berhasil menjaga efektivitas fungsi pengawasan dan kecepatan respons terhadap temuan di lapangan. Upaya dalam mempertahankan capaian 100% dengan memperkuat sistem monitoring dan follow-up hasil inspeksi**,** termasuk koordinasi dengan pelaku usaha dan pemerintah daerah.



Gambar 1.13 Capaian Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2020 – 2024

Seluruh capaian dari 2020–2024 berada **di atas 100%**, menunjukkan bahwa **pemangku kepentingan secara aktif dan kooperatif menindaklanjuti hasil inspeksi BBPOM.** Ini mencerminkan efektivitas komunikasi lintas sektor dan solidnya hubungan kelembagaan antara BBPOM dan mitra eksternal (Dinkes, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lainnya). Capaian Tertinggi pada Tahun 2021 (119,39%) Menandakan respon luar biasa dari pemangku kepentingan terhadap hasil pengawasan, hal ini dipengaruhi oleh: Kesadaran tinggi terhadap isu keamanan obat dan makanan di masa pandemi, Peningkatan urgensi dalam tindak lanjut temuan, Pendampingan/konsultasi terhadap pelaku usaha dalam menindaklanjuti CAPA. Penurunan dari 119,39% (2021) ke 102,09% (2022) **masih dalam capaian sangat memuaskan**. Kenaikan kembali pada 2023 (109,71%) menunjukkan keberhasilan Koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik dengan pelaku usaha maupun pemangku kepentingan. Tahun 2024 capaian sebesar 100,11% **pencapaian sesuai target**. Upaya mempertahankan pencapaian sesuai target antara lain

dengan Pertahankan dan perkuat kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan melalui forum koordinasi rutin, nota kesepahaman, dan sistem tindak lanjut digital yang transparan, melakukan evaluasi mendalam atas tahun dengan capaian tertinggi (2021) untuk mengidentifikasi faktor pendorong utama agar bisa direplikasi dalam konteks pengawasan lainnya.

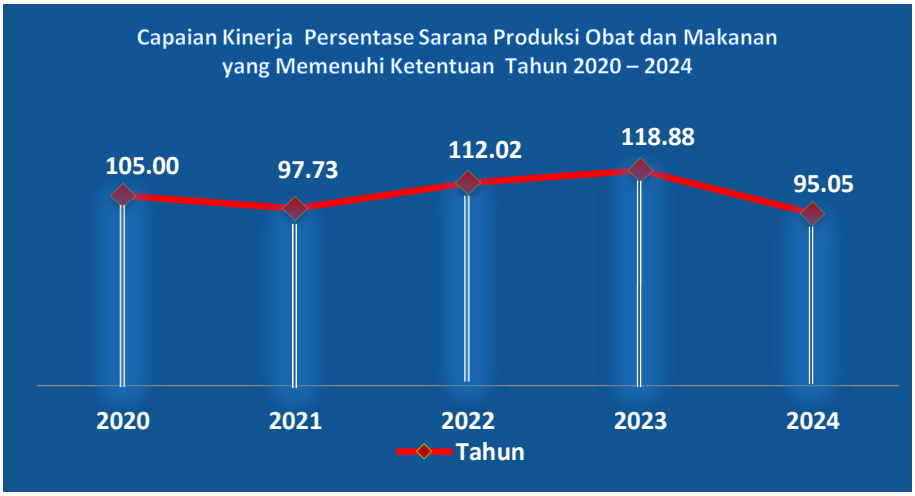


Gambar 1.14 Capaian Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024

Capaian Sangat Tinggi pada Tahun 2020 (116,55%) hal ini Menunjukkan bahwa **penyelesaian keputusan penilaian sertifikasi melebihi target secara signifikan**. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan **konsistensi penyelesaian yang melebihi target**, masing-masing di angka 100,74% dan 100,87%. Tahun 2023 sedikit turun ke **99,85%**, Tahun 2024 kembali naik ke **100,10%**, mencerminkan **pemulihan efisiensi dan kepatuhan waktu pelayanan sertifikasi**.

Capaian Selalu Mendekati atau Melebihi 100% yang memaknai komitmen terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat waktu, dan efisien sangat terjaga di BBPOM Samarinda. Ini juga mencerminkan sistem manajemen mutu dan

pengendalian proses yang baik, terutama dalam aspek pelayanan perizinan dan sertifikasi. Pelaksanaan mitigasi resiko pada keseluruhan pelaksanaan tahapan kegiatan sertifikasi sarana dilakukan secara cermat, sehingga titik kelemahan verifikasi pengajuan sertifikasi yang seluruhnya menggunakan sistem dapat terdeteksi dan segera dilakukan tindakan pengendalian sejak awal serta adanya program Sertifikasi Jemput Bola (Si Jebol) dengan pelaksanaan pendampingan denah awal, SOP dan proses pendaftaran secara daring di website *e-sertifikasi.pom.go.id* turut menunjang keberhasilan capaian.

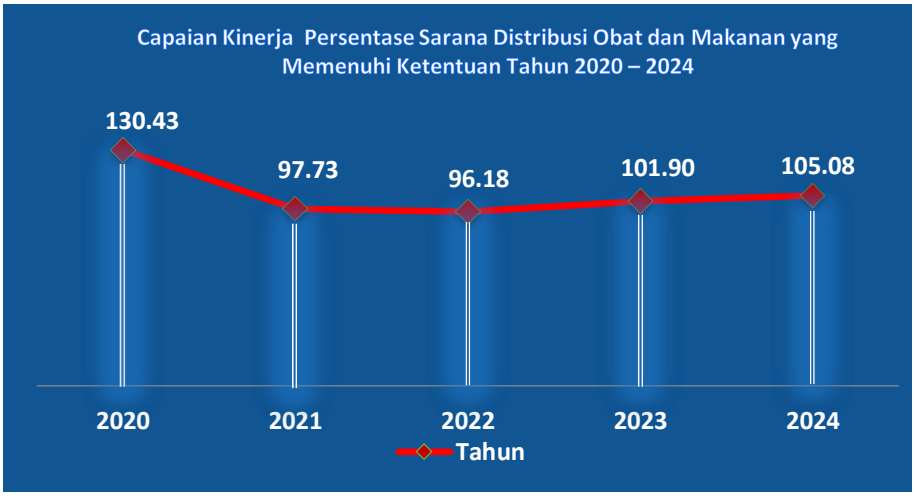


Gambar 1.15 Capaian Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 – 2024

Terjadi **naik-turun capaian kinerja yang cukup signifikan**, dengan dua tahun berada di bawah 100% (2021 dan 2024), dan tiga tahun lainnya sangat tinggi (2020, 2022, dan 2023), Ini menunjukkan bahwa **kualitas kepatuhan sarana produksi mengalami dinamika**, yang bisa dipengaruhi oleh faktor internal pelaku usaha maupun intensitas pembinaan dari BBPOM di Samarinda. Capaian Tertinggi di Tahun 2023 (118,88%) Ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa, Faktor penyebab bisa meliputi: Efektivitas pembinaan teknis

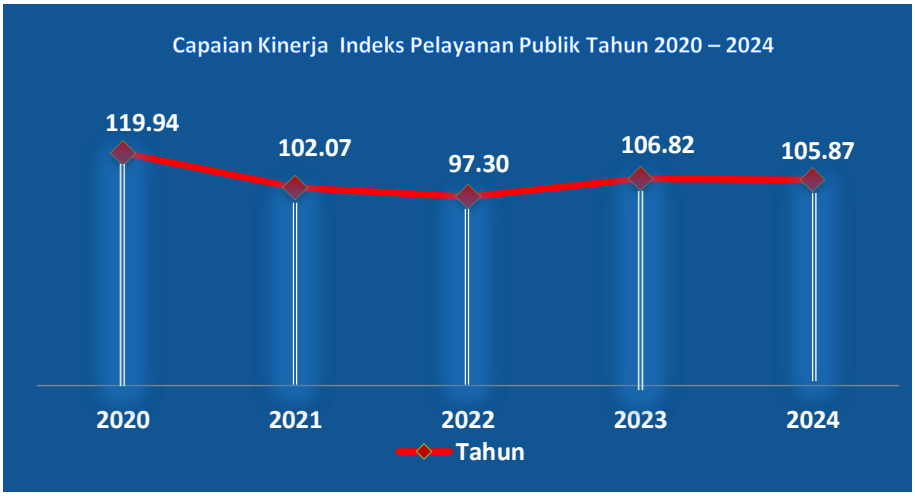
dan pendampingan, Kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha yang meningkat, Sinergi lintas sektor dalam pengawasan dan sertifikasi.

Penurunan Signifikan di Tahun 2024 (95,05%) Ini merupakan capaian **terendah selama lima tahun terakhir**, dan **berada di bawah target standar 100%,** karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian diantaranya, Bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha baik pada saat pelaksanaan inspeksi maupun yang diselenggarakan secara khusus baik secara luring maupun daring agar produsen mampu menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan dalam rangak meningkatan pengetahuan dan komitmen pelaku usaha terhadap cara produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalan penyusunan / pembuatan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (*CAPA*) hasil inspeksi, Sosialisasi penggunaan website pom.go.id dan jdih.pom.go.id untuk akses informasi terkini terkait Obat dan Makanan.



Gambar 1.16 Capaian Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 – 2024

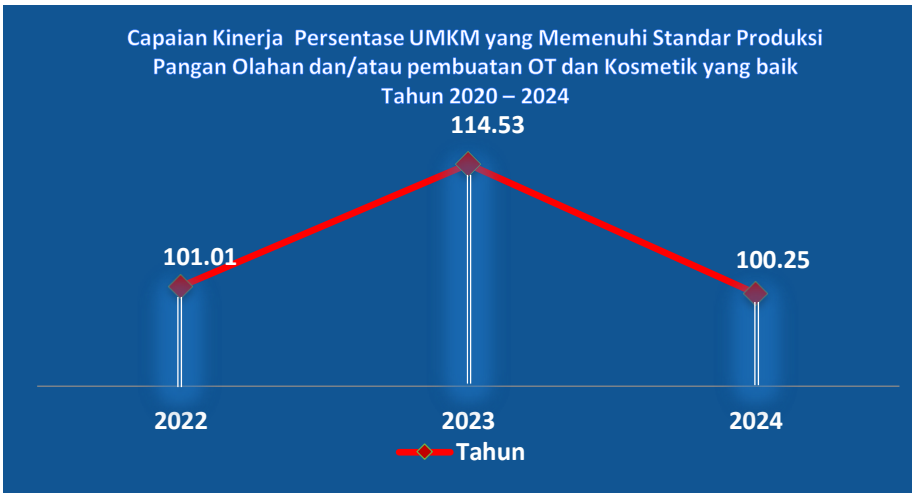
Capaian Tertinggi di Tahun 2020 (130,43%) Capaian luar biasa ini menunjukkan bahwa **jumlah sarana distribusi yang memenuhi ketentuan jauh melebihi target.** Penurunan pada Tahun 2021 dan 2022 Capaian turun ke **97,73% (2021)** dan **96,18% (2022)** — **di bawah target nasional 100%**. Hal ini bisa menjadi indikasi adanya tantangan seperti: Adaptasi terhadap regulasi baru pasca pandemi, Menurunnya kepatuhan akibat tekanan ekonomi, Kendala pembinaan karena pembatasan mobilitas. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan ke **101,90%**, dan dilanjutkan peningkatan lagi pada 2024 ke **105,08%**. Ini menandakan bahwa **strategi pembinaan dan pengawasan BBPOM mulai kembali efektif**, dan kesadaran pelaku distribusi terhadap pemenuhan ketentuan semakin baik. Hal ini terjadi dikarenakan Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri, Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi memudahkan komunikasi dan tukar informasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga mendorong sarana mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk cerdas memilih produk, Tindakan perbaikan dan pencegahan dari hasil temuan pemeriksaan sebelumnya, yang dilakukan oleh pelaku usaha telah diterapkan secara konsisten sehingga pelanggaran yang sejenis tidak ditemukan dalam pemeriksaan berikutnya, Kerjasama dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sarana distribusi obat dan makanan.



Gambar 1.17 Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020 – 2024

Capaian Tertinggi pada Tahun 2020 (119,94%) Nilai ini **jauh melampaui target**, mencerminkan **respon pelayanan publik yang luar biasa baik di awal masa pandemi**, hal ini antara lain dipengaruhi oleh: Adaptasi cepat terhadap sistem layanan daring, Kecepatan respon terhadap kebutuhan masyarakat yang tinggi saat krisis, tingkat kepuasan tinggi terhadap layanan konsultasi, edukasi, dan informasi. **Penurunan di Tahun 2022 (97,30%)** Ini adalah **satu-satunya tahun dengan capaian di bawah target**, yang perlu dicermati. Faktor yang memengaruhi: Penyesuaian terhadap perubahan kebijakan layanan pasca pandemi, Overload pelayanan atau kekurangan SDM saat aktivitas kembali normal, Peningkatan ekspektasi masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi. Tahun 2023 capaian meningkat signifikan ke **106,82%**. Tahun 2024 tetap tinggi dan stabil di **105,87%**. Ini menunjukkan **perbaikan sistem layanan dan keberhasilan strategi penguatan kualitas pelayanan publik**, seperti pelayanan berbasis digital, integrasi layanan satu pintu, dan penyederhanaan prosedur. Meskipun sempat turun, **empat dari lima tahun capaian selalu di atas 100%**, menandakan bahwa **pelayanan publik BBPOM Samarinda**

sangat memuaskan dan profesional secara konsisten.



Gambar 1.18 Capaian Kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2020 – 2024

Penetapan target UMKM yang memenuhi standar produksi mulai dilakukan pada tahun 2022. Selama tiga tahun terakhir, capaian **selalu melampaui target**, menunjukkan bahwa **pendampingan dan pembinaan terhadap UMKM berjalan sangat efektif** Ini mencerminkan keberhasilan Balai Besar POM di Samarinda dalam Meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya produksi yang sesuai standar, Memberikan edukasi teknis secara intensif, dan Mendorong penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) dan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik/OT yang Baik). **Capaian Tertinggi pada Tahun 2023 (114,53%)** Tahun ini mencatat **lonjakan signifikan**, yang dapat diartikan sebagai Banyaknya UMKM baru yang berhasil difasilitasi hingga memenuhi standar, Sejak tahun 2020, BBPOM di Samarinda mempunyai inovasi SI Jebol (Seksi Sertifikasi Jemput Bola) yang secara intensif melakukan pendampingan secara luring maupun daring sehingga membantu UMKM memenuhi standar, Adanya perubahan regulasi dan prosedur yang lebih banyak

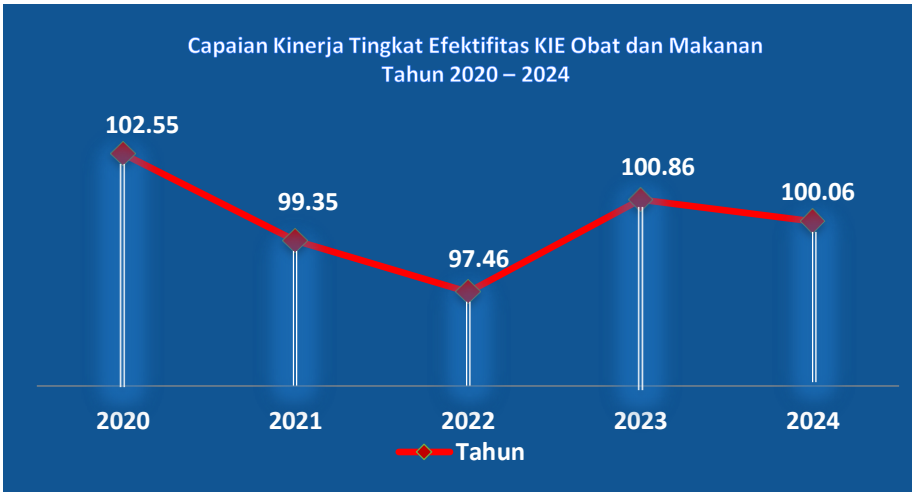
memberikan kemudahan dan kelonggaran dalam memperoleh perizinan, membuat UMKM juga bersemangat untuk memperoleh legalitas produk. **Penurunan Kembali pada Tahun 2024 (100,25%)** Meskipun turun, capaian **masih sangat baik dan memenuhi target**. Penurunan terjadi karena Skema program mulai bergeser dari kuantitas ke kualitas (fokus pada UMKM yang sudah lebih mapan), terbatasnya sumber daya atau kuota pendampingan, tantangan pemenuhan standar pada UMKM baru di wilayah terpencil atau dengan kapasitas produksi terbatas.

Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan indikator baru pada tahun 2024, meskipun demikian pada tahun 2023 Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota telah menjadi penilaian indikator kinerja direktif penugasan pada SKP kepala BBPOM di Samarinda dengan target 95% diperoleh realisasi sebesar 99.60%. Dapat disimpulkan capaian indikator ini meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan keberhasilan keterlibatan BBPOM di Samarinda secara optimal dalam program sediaan farmasi dan makanan serta program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota di tahun 2024

5. **Sasaran Kegiatan (SK5)**

   Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BBPOM di Samarinda mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Samarinda, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Samarinda akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Samarinda mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut (1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan; (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman; (3) Jumlah desa pangan aman; dan (4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

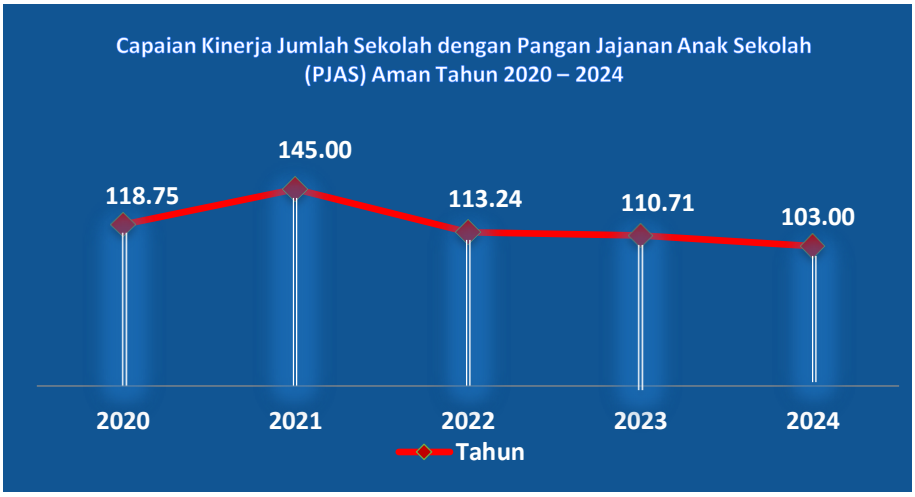


Gambar 1.19 Capaian Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024

Capaian Tertinggi di Tahun 2020 (102,55%) Menunjukkan bahwa program KIE pada masa awal pandemi **berjalan sangat efektif**, dikarenakan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi keamanan obat dan makanan, Media komunikasi yang lebih aktif (media sosial, webinar, siaran langsung), Cepatnya adaptasi metode KIE secara daring. Tahun

2021 turun ke **99,35%**, dan tahun 2022 mencapai titik terendah di **97,46%**. Penurunan ini disebabkan oleh Kejenuhan masyarakat terhadap informasi berulang (infodemik), Keterbatasan tatap muka di lapangan, Hambatan konektivitas atau keterjangkauan KIE daring di daerah tertentu. Tahun 2023 meningkat ke **100,86%**, dan tahun 2024 tetap stabil pada **100,06%**. Hal ini menunjukkan bahwa **strategi komunikasi publik BBPOM telah kembali berjalan optimal**, dengan kemungkinan peningkatan partisipasi masyarakat dan inovasi media KIE.

Selama lima tahun, **empat tahun berada di atau di atas 99%**, menunjukkan **kinerja KIE yang konsisten dan berdaya jangkau luas**, serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat.



Gambar 1.20 Capaian Kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 – 2024

Selama lima tahun berturut-turut, capaian selalu **di atas 100%**, menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Samarinda **sangat berhasil dalam mendorong terciptanya sekolah-sekolah dengan PJAS Aman,** Ini mencerminkan kuatnya kolaborasi antara BBPOM di Samarinda dengan pihak sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat sekolah.

Capaian Tertinggi pada Tahun 2021 (145%) Angka ini **sangat tinggi dan mencerminkan akselerasi program PJAS secara masif**, dipengaruhi berbagai factor antara lain Antusiasme sekolah yang tinggi dalam menerapkan program PJAS pasca pandemi, Optimalisasi pelaksanaan program secara daring atau hybrid, Integrasi PJAS dengan program lain seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) atau Sekolah Adiwiyata.
Terjadi penurunan tren dari 113,24% (2022), 110,71% (2023) dan 103,00% (2024). Penurunan ini bersifat **wajar dan tidak kritis**, namun bisa menjadi sinyal perlunya penyegaran strategi agar tidak terjadi kejenuhan program.



Gambar 1.21 Capaian Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020 – 2024

Target Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2024 merupakan target kumulatif dari tahun 2020 sampai dengan target tahun 2024. Target indikator ini telah ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.Jika dilihat capaian di tahun 2020 capaian 100% kategori Baik, tahun 2021 capaian 100% kategori Baik, tahun 2022 capaian 100% kategori Baik, Tahun 2023 capaian 100% kategori Baik dan Tahun 2024 capaian 100% kategori Baik. Semua tahapan kegiatan dapat dilaksanakan di tahun 2024.



Gambar 1.22 Capaian Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2020 – 2024

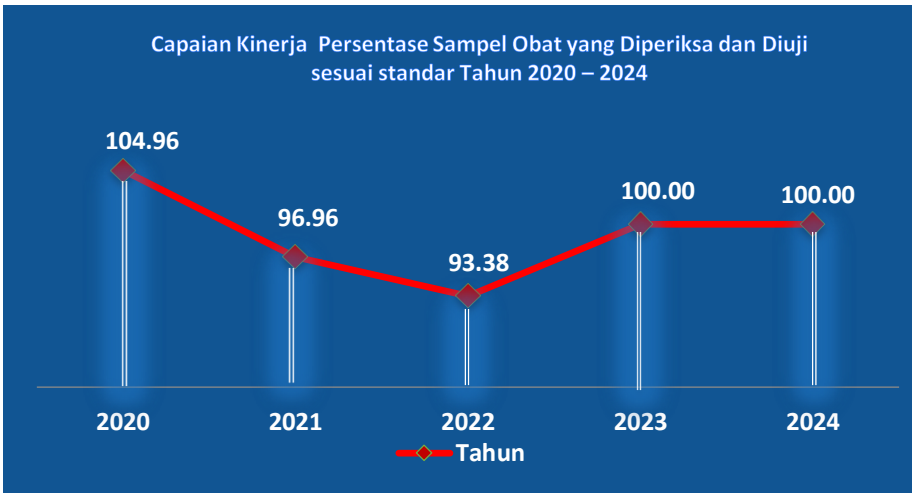
Target Jumlah Pasar dengan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PABK) tahun 2024 merupakan target kumulatif dari tahun 2020 sampai dengan target tahun 2024. Target indikator ini telah ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024. Jika dilihat % capaian di tahun 2020 capaian 100% kategori Baik, tahun 2021 capaian 100% kategori Baik, tahun 2022 capaian 100% kategori Baik, Tahun 2023 capaian 100% kategori Baik dan Tahun 2024 capaian 100% kategori Baik. Semua tahapan kegiatan dapat dilaksanakan di tahun 2024.

6. Sasaran Kegiatan (SK6)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BBPOM di Samarinda mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Samarinda, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Samarinda akan

meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Samarinda mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; dan (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.



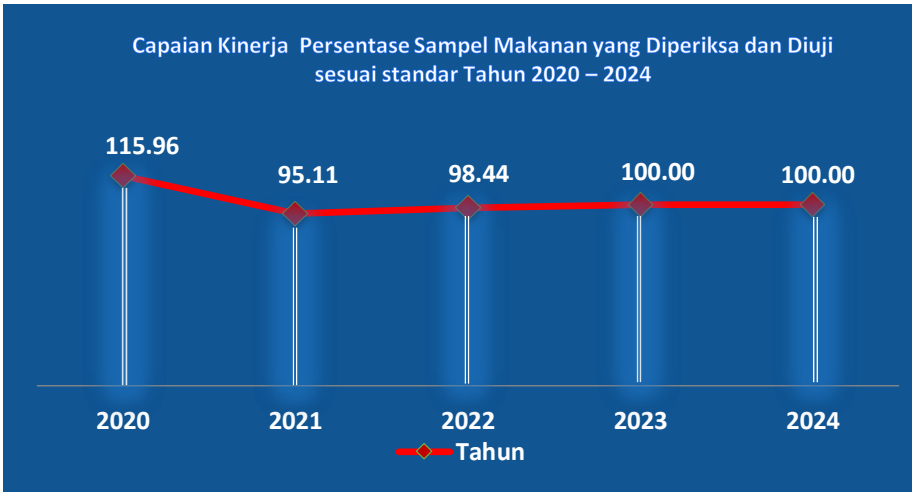
Gambar 1.23 Capaian Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai standar Tahun 2020 – 2024

Capaian Tertinggi pada Tahun 2020 (104,96%), Menunjukkan bahwa **pengujian sampel obat melampaui target**, hal ini dikarenakan beberapa factor diantaranya, Perluasan cakupan sampling dalam rangka menjamin keamanan obat di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat, Efisiensi laboratorium dan percepatan proses uji. Capaian turun ke **96,96% (2021)** dan **93,38% (2022)**, keduanya **di bawah target 100%**. Hal ini dapat disebabkan oleh terbatasnya akses lapangan dan distribusi logistik pengambilan sampel saat pembatasan mobilitas, Penyesuaian terhadap beban kerja laboratorium, Keterlambatan pengujian akibat pengalihan sumber daya untuk pengawasan pandemi.

Pemulihan dan Konsistensi di Tahun 2023–2024 (100%)

Capaian kembali normal dan **mencapai target** dua tahun berturut-turut. Ini menggambarkan Stabilnya sistem sampling dan pengujian, Pemulihan kinerja laboratorium BBPOM di Samarinda, Tersusunnya kembali prioritas pengawasan rutin setelah kondisi pandemi mereda.

Setelah dua tahun menurun, capaian kembali mencapai target dan menunjukkan **kemampuan BBPOM di Samarinda dalam beradaptasi serta menjaga mutu pengawasan sampel obat.**



Gambar 1.24 Capaian Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai standar Tahun 2020 – 2024

Capaian Sangat Tinggi pada Tahun 2020 (115,96%) menunjukkan bahwa **jumlah sampel makanan yang diperiksa dan diuji melampaui target** secara signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh **Peningkatan kegiatan pengawasan pangan** saat awal pandemi, Adanya **instruksi nasional untuk intensifikasi sampling** produk pangan, terutama yang beredar luas seperti makanan siap saji, kemasan, dan bantuan sosial, dan percepatan respon BBPOM terhadap kekhawatiran masyarakat atas keamanan pangan. **Penurunan Capaian pada Tahun 2021 (95,11%) dan 2022 (98,44%)** Kedua tahun ini mencatat **capaian di bawah target (100%)**, walaupun masih dalam rentang kinerja wajar. Penurunan ini disebabkan oleh

Keterbatasan mobilitas dan pengawasan langsung selama masa pembatasan aktivitas, **Gangguan distribusi logistik** pengambilan sampel, Beban prioritas pengawasan yang dialihkan sementara ke produk lain seperti obat dan alat kesehatan. **Pemulihan Kinerja dan Konsistensi di Tahun 2023–2024 (100%)** Capaian tepat 100% selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa **sistem pengawasan pangan BBPOM di Samarinda kembali stabil dan optimal**. Mencerminkan pemulihan kinerja laboratorium dan kelancaran proses sampling serta uji laboratorium terhadap makanan.

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Samarinda melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 1.25 Capaian Kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024

Capaian Sangat Tinggi di Tahun 2020 (153,29%) Menandakan **lonjakan signifikan dalam efektivitas penindakan**, jauh melampaui target. Hal ini disebabkan oleh Pengungkapan kasus besar atau strategis, seperti peredaran ilegal obat atau kosmetik tanpa izin edar, **Peningkatan kolaborasi dengan APH** (Aparat Penegak Hukum), seperti kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah, **efek pandemi**, di mana banyak pelaku usaha ilegal memanfaatkan celah distribusi daring dan kemudian berhasil ditindak cepat oleh BBPOM di Samarinda. Penurunan Bertahap Namun Masih Sangat Baik (2021–2022) Tahun 2021 **115,98%**, masih menunjukkan capaian tinggi dan respon cepat terhadap pelanggaran. Tahun 2022 **102,04%**, mendekati target namun tetap memenuhi indikator keberhasilan. Penurunan ini bisa mencerminkan bahwa: **Jumlah kasus menurun (efek jera atau pencegahan efektif)**, Fokus bergeser dari kuantitas penindakan ke kualitas dan pemulihan pasca kasus.

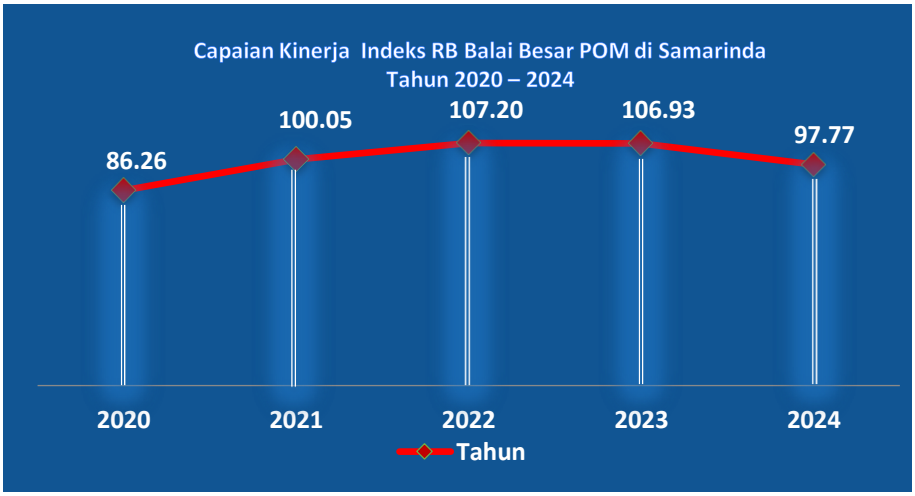
Capaian **101,01% (2023)** dan **100% (2024)** menunjukkan bahwa **seluruh penindakan berjalan sesuai rencana kerja dan target**

nasional. Menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penindakan sudah **mapan dan terintegrasi dengan baik**, dengan Intensifikasi perencanaan dan pengumpulan bahan keterangan melalui kegiatan intelijen untuk mendapatkan informasi berasal dari informan atau masyarakat, serta dari berbagai media cetak, media elektronik dan media social, salah satunya melalui inovasi "MOLEN Mahakam", serta dari kegiatan patrol siber untuk mengetahui akun-akun penjual produk obat dan makanan illegal atau tanpa izin edar, Intensifikasi evaluasi secara rutin terkait hasil pengumpulan bahan keterangan melalui kegiatan intelijen berperan dalam menentukan waktu dan sasaran yang tepat. Sehingga dapat meminimalkan risiko-risiko kegagalan dalam operasi penindakan, Adanya sistem pelaporan yang terintegrasi antara PPNS, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Korwas PPNS Polda Kaltim, dan Pengadilan Negeri Samarinda yang dapat mengurangi potensi intervensi proses penyidikan.

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Samarinda yang optimal

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Samarinda, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Samarinda. Sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Indeks RB Balai Besar POM di Samarinda; (2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda; dan (3) Nilai Pengelolaan Kearsipan.



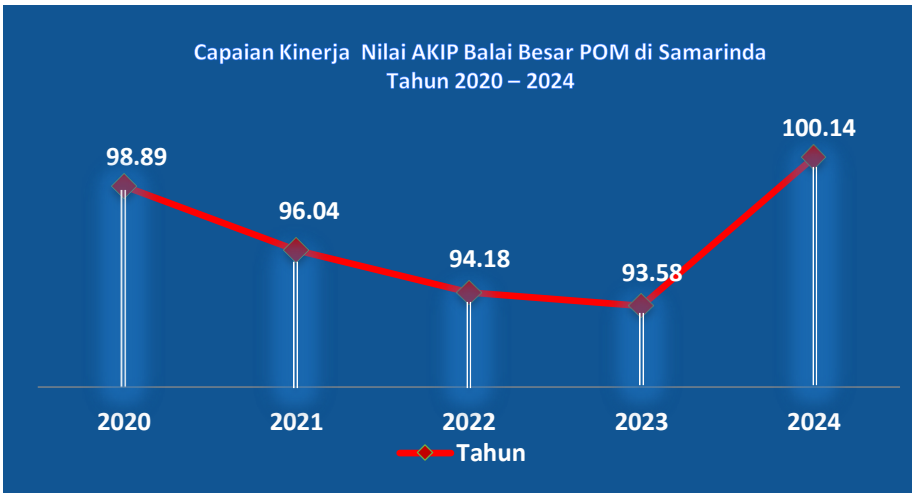
Gambar 1.26 Capaian Kinerja Indeks RB Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2020 – 2024

Peningkatan Tajam pada Tahun 2021–2022 Terjadi lonjakan capaian dari **86,26% (2020)** ke **100,05% (2021)**, bahkan mencapai **107,20% (2022)**. Ini menandakan adanya **upaya serius dan masif dalam pembenahan tata kelola organisasi**, termasuk: Implementasi zona integritas (ZI), Penguatan manajemen kinerja, Digitalisasi layanan dan administrasi, Peningkatan kualitas SDM serta pengawasan internal. **Capaian di Tahun 2023 (106,93%)** juga menunjukkan **konsistensi dalam mempertahankan tata kelola yang baik**, serta penguatan budaya kerja birokrasi yang melayani, akuntabel, dan transparan. **Penurunan di Tahun 2024 (97,77%)** meski tetap dalam kategori **baik**, penurunan ini menjadi catatan penting. Penurunan disebabkan oleh Evaluasi eksternal yang lebih ketat, Penurunan capaian pada komponen tertentu (misal: akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, atau manajemen perubahan), Perubahan indikator penilaian RB secara nasional oleh KemenPANRB.

Capaian Tahun 2020 (86,26%) sebagai Titik Awal Reformasi, di awal periode, capaian masih dalam kategori **sedang**, mencerminkan perlunya percepatan reformasi. Namun, **perbaikan**

signifikan dalam dua tahun berikutnya membuktikan efektivitas intervensi reformasi birokrasi secara menyeluruh di BBPOM Samarinda.

Capaian RB BBPOM Samarinda menunjukkan **perjalanan reformasi yang sangat progresif**, dari nilai sedang menjadi sangat baik kemudian sedikit koreksi di tahun 2024.



Gambar 1.27 Capaian Kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2020 – 2024

Capaian Sangat Tinggi di Tahun 2020 (98,89%) menandakan bahwa BBPOM Samarinda memiliki sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang **sangat baik**. Ini bisa dicapai melalui: Perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan strategis, Sistem pelaporan berbasis hasil (result-based), Dokumentasi yang lengkap dan akurat.

Tahun 2021–2023 menunjukkan **tren penurunan berturut-turut**, yaitu 96,04%, 94,18% , 93,58%. Meskipun masih dalam kategori **baik**, penurunan ini dapat menjadi sinyal: Adanya **kesenjangan antara perencanaan dan realisasi**, atau Penurunan kualitas pelaporan kinerja, efektivitas pengukuran indikator, atau konsistensi evaluasi internal. Faktor lain berasal dari **perubahan standar evaluasi AKIP** secara nasional yang makin ketat dan berbasis sistem elektronik terintegrasi.

Capaian Kinerja Tahun 2024 (100,14%) Kenaikan signifikan ini

mencerminkan keberhasilan dalam **Menutup celah evaluasi tahun sebelumnya**, Melakukan perbaikan sistematika dokumen kinerja, Penguatan mekanisme pengendalian dan tindak lanjut evaluasi, Meningkatkan keselarasan antara anggaran dan kinerja (keterkaitan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan).

Setelah 3 tahun berturut-turut mengalami penurunan nilai, **tahun 2024 menjadi momentum kebangkitan AKIP**, sekaligus menunjukkan komitmen BBPOM Samarinda dalam memperkuat tata kelola kinerja yang akuntabel.

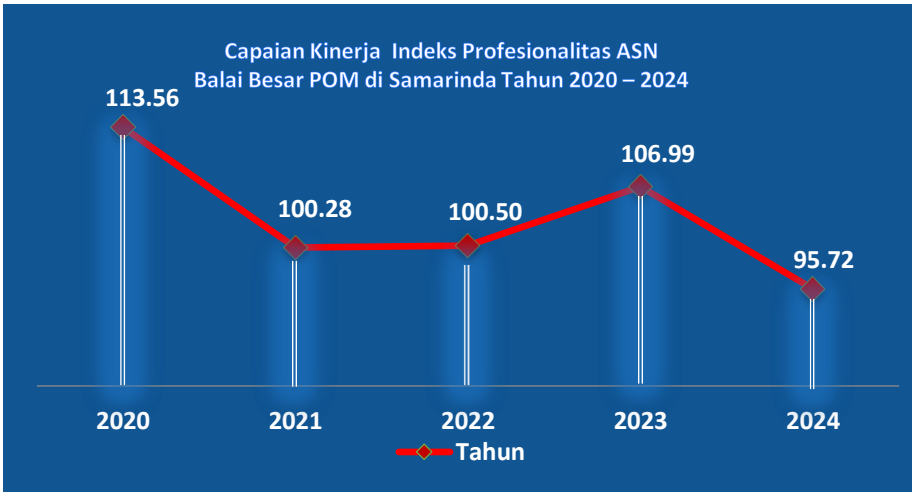
Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan adalah indikator baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk Nilai Pengelolaan Kearsipan tahun 2021 telah dilakukan penilaian oleh Biro Umum sebagai bentuk pengawasan pengelolaan kearsipan di UPT Badan POM Sedangkan tahun 2022 dan 2023 Nilai Pengelolaan Kearsipanditetapkan sebagai indikator direktif penugasan SKP Kepala Balai. Meskipun demikian dapat di simpulkan bahwa realisasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terdapat peningkatan Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Samarinda, dengan Nilai realisasi berturut-turut sebagai berikut 77.79; 85.278; 92.35 dan 92.99.

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Samarinda yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran kegiatan ini digunakan satu indikator yaitu: Indeks Profesionalitas

ASN Balai Besar POM di Samarinda.



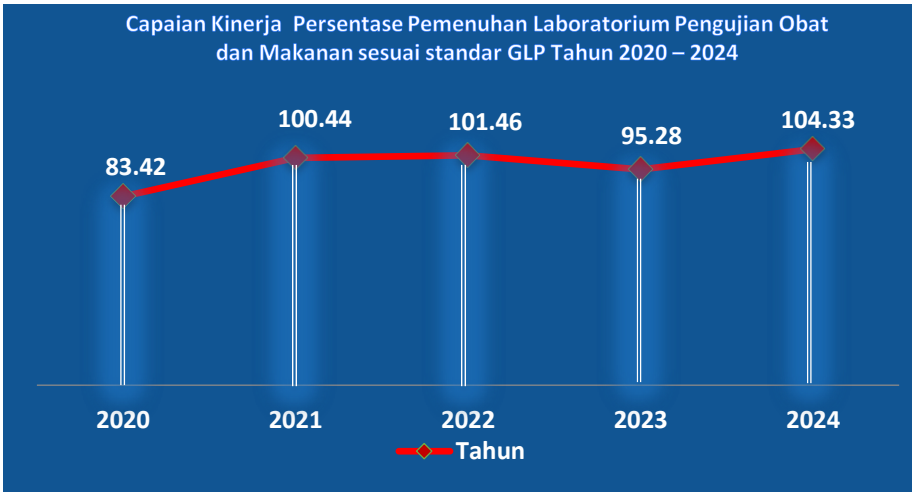
Gambar 1.28 Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2020 – 2024

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Samarinda terjadi penurunan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, capaian pada tahun 2021 sempat menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya, akan tetapi ditahun 2022 dan 2023 capaian meningkat. Pada tahun 2024 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Samarinda menurun menjadi sebesar 95.72%. Tahun 2024 terjadi penurunan realisasi yang cukup signifikan dikarenakan terdapat perubahan instrument pengukuran IP ASN di pertengahan tahun 2024. Sementara pada tahun 2023 telah dilakukan reviu target PK 2024 oleh Biro Umum berdasarkan realisasi 2023 yang telah melampaui target 2024, target semula sebesar 85.20% pada dokumen Reviu Renstra menjadi 90.59% sehingga realisasi tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan

10. Sasaran Kegiatan (SK10)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

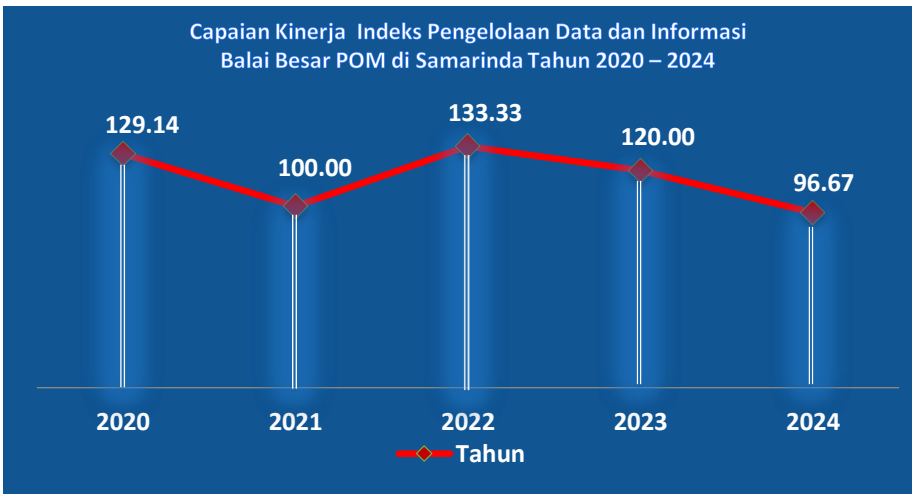
Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah menguatnya laboratorium, sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sasaran kegiatan ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP; dan (2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Samarinda yang optimal.



Gambar 1.29 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2020 – 2024

Capaian mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 17.02% karena selain target pada tahun tersebut menurun, realisasi juga meningkat pesat dari 63.40% menjadi 75.33%. Pada tahun 2022, target meningkat cukup besar (5.00%) sehingga capaian hanya meningkat 1.02% walaupun realisasinya meningkat 5.84%. Penurunan capaian cukup drastis terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 6.18%. Selain disebabkan karena naiknya target (5.00%), turunnya realisasi yang disebabkan karena konsep regionalisasi baru juga turut mempengaruhi

rendahnya capaian tersebut. Kemudian dilakukan reviu terhadapat target PK tahun 2024 berdasarkan realisasi tahun 2023 dan disetujui oleh unit pengampu POMN sehingga target semula pada Reviu Renstra sebesar 90% menjadi 82.08%. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan realisasi sebesar 4.64 % yang disebabkan karena adanya peningkatan standar ruang lingkup pengujian serta peningkatan kompetensi penguji laboratorium.



Gambar 1.30 Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2020 – 2024

Tahun **2020 (129,14%)** dan **2022 (133,33%)** menunjukkan **pengelolaan data dan informasi yang sangat** jauh melebihi target.

Tahun 2021 (100%) dan **2023 (120%)** masih menunjukkan **kinerja sangat baik** dan sesuai target nasional. Ini mencerminkan bahwa pengelolaan data telah menjadi bagian rutin dari manajemen organisasi yang solid.

Penurunan Capaian pada Tahun 2024 (96,67%) karena belum tercapainya secara maksimal pengelolaan data dan informasi terkait pelaporan informasi keracunan di BOC – SPIMKER

11. Sasaran Kegiatan (SK11)

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Samarinda secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BBPOM di Samarinda dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran kegiatan ini diukur menggunakan 4 (empat) indikator yaitu: (1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda; (2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa; (3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; dan (4) Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri



Gambar 1.31 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2020 – 2024

Secara umum, tren Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Besar POM di Samarinda dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan pola menurun pada tiga tahun awal, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024. Tahun 2020 – 2021 Penurunan Capaian dari **99,31 menjadi 95,96**. Penurunan sebesar **3,35 poin** ini kemungkinan disebabkan oleh **penyesuaian anggaran dan pelaksanaan program akibat pandemi COVID-19**,

yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan. Tahun 2022 Capaian kembali turun menjadi **94,79** dan tahun 2023 terjadi sedikit kenaikan 94,97 hingga di tahun 2024 NKA meningkat tajam menjadi 107,53, hal ini karena pada akhir tahun 2023 dilakukan reviu terhadap target tahun 2024 berdasarkan realisasi selama tahun 2020-2023 dan disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan target semula pada reviu Renstra adalah 96.10% menjadi 90.58%. kenaikan ini juga menunjukkan adanya **terobosan strategis**, efisiensi pelaksanaan anggaran, serta keberhasilan program-program prioritas yang dijalankan secara optimal.

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa merupakan indikator baru di tahun 2024, meskipun demikian sejak tahun 2022 sudah menjadi indikator kinerja directif penugasan pada SKP Kepala BBPOM di Samarinda. Pada tahun 2022 realisasi 90 % dengan target 81.45%, pada tahun 2023 realisasi 100 % dengan target 90%.Selama tahun 2022-2024 realisasi melampaui target yang telah ditetapkan, serta terdapat peningkatan realisasi indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa setiap tahunnya.

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan indikator baru di tahun 2024, meskipun demikian sejak tahun 2022 sudah menjadi indikator kinerja directif penugasan pada SKP Kepala BBPOM di Samarinda. Pada tahun 2022 realisasi 91 % dengan target 79%, pada tahun 2023 realisasi 99.3 % dengan target 91%, realisasi tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022, namun di tahun 2024 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, karena adanya optimalisasi sisa anggaran belanja modal alat laboratorium di triwulan III dan status unit indent sehingga pembayaran baru

selesai di awal bulan Desember 2024, sekitar 400juta nilai aset yang belum keluar Penetapan Status Penggunaan (PSP) di akhir tahun. Hal ini berakibat nilai Penetapan Status Penggunaan (PSP) menurun.

Tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri merupakan indkator baru ada di tahun 2024. Namun sejak tahun 2022 Biro Umum telah melakukan penilaian UPT terhadap indikator ini, nilai tersebut dapat dilihat pada aplikasi SIROUM Badan POM. Tahun 2022 realisasi sebesar 30.98 dan tahun 2023 sebesar 36.67. jika dilihat realisasi tahun 2022-2024 maka bisa disimpulkan capaian indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri meningkat.

1.1.2. Aspirasi *Stakeholder*

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda memandang perlunya penguatan sistem pengawasan obat dan makanan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat. Perubahan yang terjadi di tingkat global, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan ekonomi telah mendorong perlunya penyesuaian kebijakan dan strategi pengawasan agar tetap relevan dan efektif.

Aspirasi dan masukan masyarakat menjadi salah satu komponen penting dalam proses perencanaan strategis BBPOM di Samarinda. Partisipasi publik berperan signifikan dalam membantu BBPOM di Samarinda memahami kebutuhan, harapan, serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam kaitannya dengan keamanan pangan, mutu obat, serta

ketersediaan produk kesehatan yang aman dan bermutu.

Masyarakat memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra dalam mendukung sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan aktif masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan perilaku konsumsi yang cerdas dan bertanggung jawab.

Sebagai bentuk implementasi prinsip transparansi dan partisipatif dalam tata kelola pemerintahan yang baik, BBPOM di Samarinda secara rutin melakukan penjaringan aspirasi melalui berbagai mekanisme, salah satunya Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BBPOM di Samarinda yang dilakukan langsung kepada responden masyarakat di provinsi Kalimantan Timur. Survei ini bertujuan memperoleh data empiris mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan.

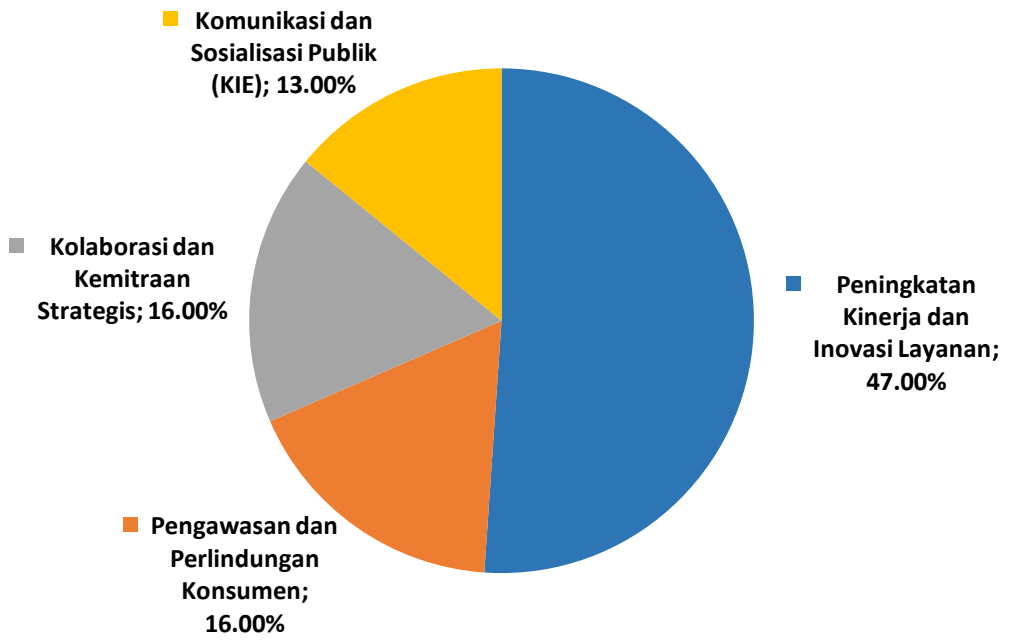
Hasil survei tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses penyusunan Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029, sehingga arah kebijakan dan program pengawasan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan perkembangan lingkungan strategis nasional maupun global. Melalui sinergi dan kolaborasi antara BPOM dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan sistem pengawasan obat dan makanan nasional dapat semakin tangguh, modern, dan berdaya saing guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan terlindungi.

Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah hasil analisis *wordcloud* dari *feedback* dan saran masukan dari masyarakat.



Gambar 1.32 *Wordcloud* dari hasil survei kepada masyarakat

Beberapa frasa yang sering muncul antara lain *"Pelayanan Prima berkelanjutan"*, *"Pendampingan umkm"*, dan *"Peningkatan Sosialisasi ke Masyarakat"*, serta lainnya dapat dilihat pada gambar di atas. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah diklasterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BBPOM di Samarinda melakukan melakukan Peningkatan kinerja dan inovasi layanan, Pengawasan dan perlindungan konsumen,kolaborasi dan kemitraan serta komunikasi dan sosialisasi publik (KIE).



Gambar 1.33 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat

Berdasarkan hasil survey dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. BBPOM di Samarinda dapat mempertahankan pelayanan publik yang telah baik dan terus melakukan peningkatan kualitas layanan serta terus menciptakan inovasi pada layanan publik
2. BBPOM di Samarinda melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar dan memberikan perlindungan masyarakat dengan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat.
3. BBPOM di Samarinda diharapkan dapat terus memberikan dukungan terhadap UMKM.
4. BBPOM di Samarinda agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Selain keempat poin tersebut, pada kegiatan yang melibatkan diskusi dengan pakar gender dan organisasi masyarakat dengan kebutuhan khusus, BBPOM di Samarinda diharapkan dapat lebih memperhatikan

permasalahan, kebutuhan dan pengalaman dari setiap elemen masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak, lanjut usia, kelompok rentan secara fisik (termasuk disabilitas), sosial dan ekonomi serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyaraakt dan pelaku usaha dengan imbang gender.

I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menyusun Rencana Strategis BBPOM di Samarinda 2025-2029, pemahaman yang komprehensif terhadap potensi dan tantangan yang dihadapi menjadi faktor krusial dalam merumuskan strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan khasiat produk kesehatan dan pangan, BBPOM di Samarinda dituntut untuk proaktif dalam mengantisipasi berbagai tantangan kompleks yang muncul.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BBPOM di Samarinda tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), BBPOM di Samarinda menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BBPOM di Samarinda, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

I.2.1 Kekuatan *(Strength)*

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi

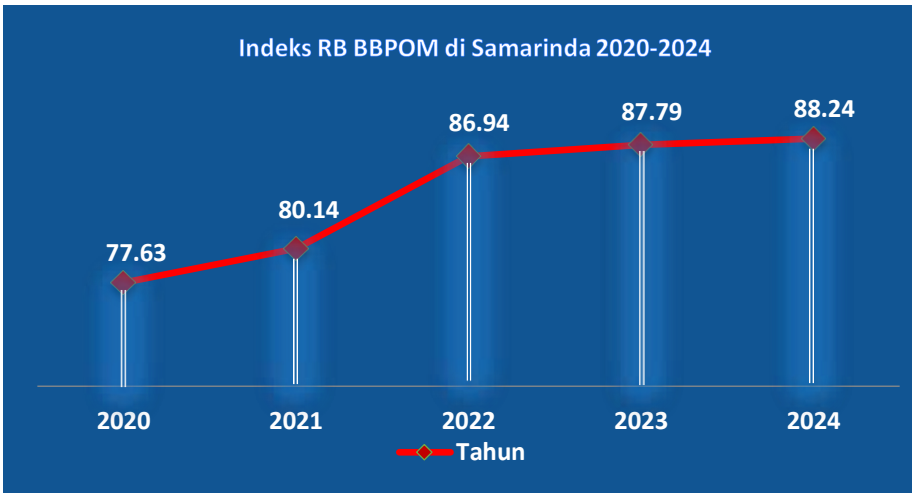
kekuatan yang dimiliki Balai Besar POM di Samarinda, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai Besar POM di Samarinda keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai Besar POM di Samarinda di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Samarinda, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. **Komitmen Pimpinan dan Seluruh ASN BBPOM di Samarinda dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Pengawasan Internal yang Memadai.**

   Balai Besar POM di Samarinda berkomitmen dalam mendukung terwujudnya kinerja Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Internal yang kuat dan terukur. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penguatan budaya integritas, serta pelaksanaan pengawasan yang transparan dan akuntabel di wilayah kerja Kalimantan Timur. Balai Besar POM di Samarinda secara konsisten melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta berperan aktif dalam menjaga efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan penerapan Reformasi Birokrasi Tematik. Upaya ini menjadi wujud nyata kontribusi Balai Besar POM di Samarinda dalam memperkuat kepercayaan publik serta mendukung BPOM sebagai lembaga pengawas yang bersih, profesional, dan berdaya saing.

   Balai Besar POM di Samarinda juga berkomitmen melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui tata kelola

birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi (RB). Pelaksanaan RB secara konsisten dilaksanakan terhadap RB General dan RB Tematik. Hal ini dibuktikan dengan capaian Indeks RB Balai Besar POM di Samarinda dalam periode Renstra tahun 2020-2024 dan yang terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 dengan nilai 88,24 (delapan puluh delapan ribu koma dua puluh empat).



Gambar 1.34 Indeks RB BBPOM di Samarinda 2020-2024

Sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan RB, pengawasan internal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap langkah reformasi berjalan sesuai arah yang ditetapkan, bebas dari penyimpangan, dan menghasilkan *output* yang nyata.

2. Memiliki SDM yang Kompeten dan Profesional

Memiliki SDM yang Kompeten dan Profesional menjadi salah satu kekuatan utama Balai Besar POM di Samarinda dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya, dengan pengalaman teknis yang luas serta spesialisasi jabatan yang sesuai dengan fungsi masing-masing. SDM Balai Besar POM di Samarinda terdiri dari pejabat fungsional pengawas farmasi

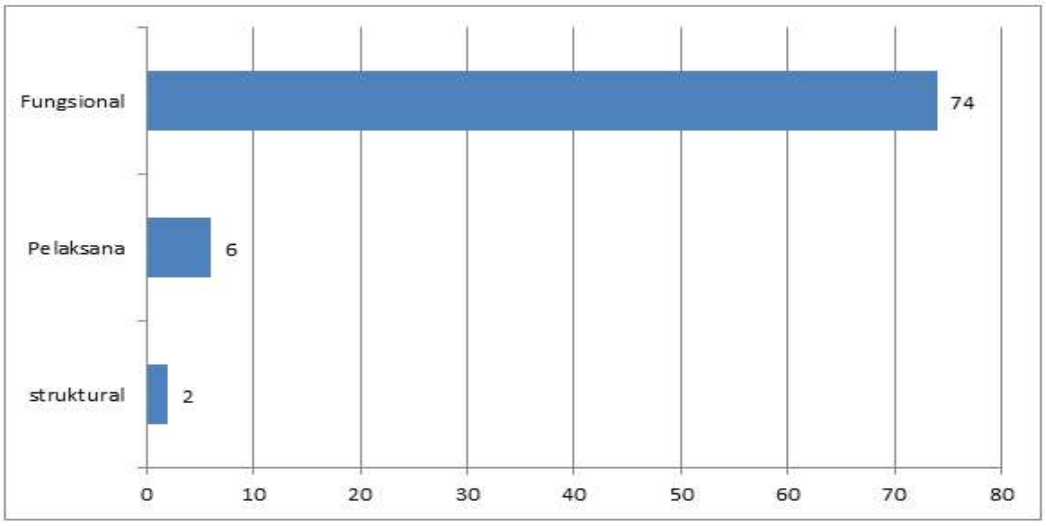
dan makanan, analis, perencana, serta tenaga teknis lainnya yang memiliki keahlian spesifik di bidang pengujian, pemeriksaan, penyuluhan, penindakan, dan penilaian. Kompetensi ini terus ditingkatkan melalui berbagai program pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan jabatan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan di wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, Balai Besar POM di Samarinda juga aktif dalam pengembangan SDM yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan kebijakan nasional, termasuk pengarusutamaan gender dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan SDM yang andal dan profesional, Balai Besar POM di Samarinda berperan penting dalam menjaga mutu dan keamanan sediaan farmasi serta pangan olahan yang beredar di masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya visi BPOM sebagai lembaga pengawas yang unggul dan terpercaya.

Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, BBPOM di Samarinda memiliki 6 (enam) Jabatan Fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Sampai dengan Tahun 2024, sebanyak 82 (delapan puluh dua) pegawai merupakan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis. 78% (tujuh puluh delapan persen) dari pegawai tersebut merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan, terdiri dari 40 (empat puluh) pegawai dengan spesialisasi pada fungsi pengujian, 13 (tiga belas) pegawai dengan spesialisasi fungsi pemeriksaan, 6 (enam) pegawai dengan spesialisasi fungsi penyuluhan, 5 (lima) pegawai dengan spesialisasi fungsi penindakan.

Kompetensi teknis maupun spesialisasi tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah.

Tidak hanya Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan,

BPOM juga didukung dengan 22% (dua puluh dua persen) Jabatan Fungsional lainnya seperti di bawah ini:



Gambar 1.35 Jumlah Pegawai Struktural, Pelaksana dan Fungsional BBPOM di Samarinda

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
1	Pengawas Farmasi dan Makanan	64
2	Pranata Komputer	1
3	Pranata Keuangan APBN	2
4	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	2
5	Analis SDM Aparatur	2
6	Perencana	3
Total		74

(Sumber data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BBPOM di Samarinda,

Tabel 1.2.Jumlah Pegawai BBPOM di Samarinda Per Jabatan Fungsional

Penguatan kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan SDM Balai Besar POM di Samarinda merupakan strategi utama dalam

meningkatkan efektivitas pengawasan serta pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan seperti munculnya produk inovatif, bahan dan kontaminan baru, serta kebutuhan akan metodologi pengujian terkini, serta pengawalan terhadap program prioritas Presiden MBG menuntut penguatan kapabilitas SDM secara berkelanjutan.

3. **Laboratorium Pengujian BBPOM di Samarinda sebagai Laboratorium Regional Kalimantan dan telah Terakreditasi ISO 17025:2017**

   Kompetensi laboratorium pengujian dapat ditunjukkan melalui Akreditasi laboratorium pengujian sesuai ISO/IEC 17025 yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional/Badan Standardisasi Nasional (KAN/BSN). Setiap laboratorium pengujian harus menerapkan sistem manajemen mutu yang tergambar dalam terpeliharanya akreditasi laboratorium sesuai ISO/IEC17025:2017. Akreditasi laboratorium pengujian bersifat voluntary, namun pengakuan akreditasi merupakan bukti kompetensi laboratorium pengujian yang diakui oleh KAN. KAN adalah suatu lembaga di bawah Presiden yang bertugas memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN). KAN diakui secara internasional melalui MLA dan MRA dengan APAC, IAF, dan ILAC dan sertifikasinya diakui di banyak negara. Laboratorium pengujian di BPOM untuk dapat memberikan jaminan validitas hasil pengujian dan sistem manajemen mutu yang handal agar menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO/IEC 17025:2017. Hasil uji laboratorium merupakan data yang valid dalam penetapan keputusan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan semakin maraknya peredaran produk yang dipalsukan

maupun yang sub standar, peran laboratorium sangat strategis.

Sebagai bagian dari jejaring laboratorium pengawasan BPOM, Balai Besar POM di Samarinda merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017, menunjukkan kompetensinya dalam penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian. Laboratorium BBPOM di Samarinda memiliki kemampuan pengujian yang meliputi sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk analisis kimia, mikrobiologi, dan toksikologi.

Berdasar Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Regionalisasi Laboratorium, Laboratorium BBPOM di Samarinda ditunjuk sebagai salah satu laboratorium regional BPOM yang berperan dalam penguatan sistem pengawasan di wilayah Kalimantan dengan laboratorium anggota BB/Balai POM di Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan, serta Loka POM di Kota Balikpapan, Sanggau, Tanah Bumbu, Kotawaringin Barat, dan Hulu Sungai Utara. Ditunjuknya BBPOM Samarinda sebagai salah satu laboratorium regional, memberikan nilai tambah bagi laboratorium pengujian BBPOM di Samarinda dimana kemampuan pengujian dan peralatan laboratorium menjadi lebih unggul dibandingkan dengan laboratorium anggota lainnya. Dengan penunjukan tersebut, Balai Besar POM di Samarinda berperan strategis dalam memastikan kecepatan, ketepatan, dan validitas hasil pengujian produk, serta mendukung upaya BPOM dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat sediaan farmasi serta pangan olahan yang beredar di masyarakat.

4. Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai

Balai Besar POM di Samarinda memiliki infrastruktur pelayanan

publik yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di wilayah Kalimantan Timur. Gedung kantor Balai Besar POM di Samarinda telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional, pelayanan publik, serta laboratorium pengujian yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Fasilitas tersebut meliputi ruang pelayanan terpadu, ruang laktasi, ruang tunggu yang nyaman, area parkir yang memadai, serta sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, Balai Besar POM di Samarinda juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, seperti sistem antrian digital, layanan konsultasi daring, serta media informasi elektronik untuk mendukung keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai tersebut, Balai Besar POM di Samarinda mampu memberikan pelayanan prima yang cepat, transparan, dan berkualitas, serta menjadi percontohan penerapan standar infrastruktur pelayanan publik di tingkat daerah.

5. **Komitmen implementasi budaya anti penyuapan yang optimal dalam kerangka kerja sistem manajemen pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan budaya anti penyuapan secara menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari sistem manajemen pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan publik dan kegiatan pengawasan.

Sebagai instansi yang mengemban amanah untuk melindungi masyarakat melalui jaminan mutu, keamanan, dan manfaat produk

yang beredar, Balai Besar POM di Samarinda memastikan bahwa seluruh pegawai memahami dan menjalankan nilai-nilai anti penyuapan sesuai dengan ketentuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Kode Etik ASN dengan melaksanakan sosialisasi secara rutin dan berkala. Setiap bentuk gratifikasi, konflik kepentingan, maupun praktik tidak etis lainnya ditolak dengan tegas dan dilaporkan melalui mekanisme pengaduan yang transparan dan dapat ditelusuri. Balai Besar POM di Samarinda menciptakan beberapa inovasi untuk mempermudah mekanisme pengaduan yang transparan dan dapat ditelusuri.

Penerapan budaya anti penyuapan ini juga didukung oleh sistem manajemen pengawasan yang terintegrasi, meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan inspeksi dan sampling, hingga tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan pendekatan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi informasi, Balai Besar POM di Samarinda mampu meminimalkan potensi penyimpangan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kredibilitas lembaga.

Melalui komitmen ini, Balai Besar POM di Samarinda berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance), memperkuat budaya kerja berintegritas, serta menjadi contoh nyata penerapan budaya anti penyuapan di lingkungan pengawasan obat dan makanan.

6. **Sinergi dan kolaborasi yang aktif bersama Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Terkait**

   Sebagai perpanjangan tangan BPOM di daerah, Balai Besar POM di Samarinda menjalin kerjasama lintas sektor yang kuat dan berkesinambungan dalam rangka memperkuat sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Kalimantan Timur.

Samarinda tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai Besar POM di Samarinda menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai Besar POM di Samarinda dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (weakness) yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Samarinda, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. **Keterbatasan Jumlah dan Distribusi SDM**

   Keterbatasan Jumlah dan distribusi sumber daya manusia serta pergerakan mutasi pegawai lintas fungsi yang dinamis dialami Balai Besar POM di Samarinda. Meskipun memiliki wilayah kerja yang luas dan kompleksitas pengawasan yang tinggi, terutama mencakup wilayah Kalimantan Timur dengan karakteristik geografis yang beragam, ketersediaan tenaga pengawas dan tenaga teknis belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan lapangan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan, inspeksi, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha secara merata di seluruh wilayah kerja. Selain itu, pergerakan mutasi pegawai yang cukup dinamis tanpa masa transisi yang memadai sering kali berdampak pada kesinambungan program kerja dan hilangnya pengetahuan institusional di tingkat pelaksana. Situasi ini menuntut Balai Besar POM di Samarinda untuk terus melakukan penyesuaian strategi kerja dan memperkuat mekanisme transfer pengetahuan antarpegawai guna menjaga kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut mencerminkan pentingnya penguatan kebijakan

distribusi SDM dan tata kelola mutasi yang lebih terencana agar Balai Besar POM di Samarinda dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan berkelanjutan

Keterbatasan jumlah dan distribusi SDM di Balai Besar POM di Samarinda berdampak besar terhadap efektivitas pengawasan obat dan makanan, sehingga meningkatkan risiko beredarnya produk tidak aman.

2. Adanya Kesenjangan Kompetensi pegawai

Kondisi kesenjangan kompetensi dirasakan oleh Balai Besar POM di Samarinda sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah BPOM. Tantangan muncul dalam upaya penguatan kapasitas pegawai, khususnya pada aspek manajerial dan sosiokultural yang berperan penting dalam efektivitas pengawasan di wilayah kerja yang luas dan beragam karakteristik sosial budayanya seperti Kalimantan Timur. Sebagian pegawai memiliki kompetensi teknis yang kuat, namun masih diperlukan peningkatan dalam kemampuan kepemimpinan, komunikasi lintas budaya, dan pengelolaan perubahan untuk mendukung kolaborasi lintas sektor dan pelaksanaan tugas pengawasan yang adaptif.

Keterbatasan kesempatan pelatihan yang merata dan berkelanjutan juga menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan peningkatan kompetensi pegawai di daerah. Hal ini berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan, inovasi pelayanan publik, dan strategi pembinaan pelaku usaha secara efektif di wilayah pengawasan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM di Balai Besar POM di Samarinda perlu diarahkan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada pengembangan soft skills dan kompetensi manajerial agar mampu menjawab tantangan dinamis di lapangan serta berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara

keseluruhan.

Kesenjangan kompetensi di Balai Besar POM di Samarinda merupakan isu strategis yang membutuhkan perhatian serius guna memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Ketidakseimbangan ini menimbulkan inefisiensi dalam proses kerja, di mana sebagian pegawai menghadapi beban kerja yang berlebihan, sementara yang lain belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kepuasan kerja pegawai, tetapi juga berpotensi menurunkan kinerja organisasi secara keseluruhan, karena tugas-tugas krusial mungkin tidak terlaksana dengan standar dan ketepatan waktu yang dibutuhkan.

3. Dukungan IT yang belum Optimal

Kondisi belum optimalnya integrasi sistem teknologi informasi juga berdampak langsung pada Balai Besar POM di Samarinda sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM di daerah. Keterbatasan interoperabilitas antar aplikasi dan belum sepenuhnya terhubungnya sistem pelaporan, administrasi, serta pengawasan menyebabkan terjadinya duplikasi data dan perlambatan proses pengolahan informasi. Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas, terutama dalam pelaporan hasil pengawasan dan koordinasi data lintas bidang.

Sebagai UPT yang berperan penting dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Kalimantan Timur, Balai Besar POM di Samarinda menghadapi tantangan dalam sinkronisasi data antara sistem pusat dan sistem lokal, yang terkadang masih dilakukan secara manual. Kondisi ini dapat menimbulkan keterlambatan dalam proses validasi informasi serta mengurangi efisiensi layanan publik. Selain itu, keterbatasan kompetensi teknis SDM di bidang teknologi informasi serta ketergantungan pada

sistem dan perangkat lunak versi lama (legacy system) turut membatasi kemampuan Balai dalam mengoptimalkan pemanfaatan data secara analitik maupun prediktif.

Dalam mendukung agenda transformasi digital BPOM, Balai Besar POM di Samarinda terus berupaya memperkuat infrastruktur dan meningkatkan kompetensi SDM TIK melalui pelatihan dan kolaborasi dengan unit pusat. Penguatan integrasi sistem dan peningkatan interoperabilitas antar aplikasi menjadi langkah strategis yang perlu dipercepat agar Balai dapat berperan lebih efektif dalam mendukung sistem pengawasan nasional yang berbasis data dan teknologi modern.

4. **Belum tersedianya data terpilah/ data gender yang memadai baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan (pelaku usaha, masyarakat, mitra kerja)**

   Balai Besar POM di Samarinda sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, juga mengalami dampak dari belum tersedianya data terpilah atau data gender yang memadai, baik terkait populasi, pelaksana kegiatan, maupun sasaran kegiatan seperti pelaku usaha, masyarakat, dan mitra kerja. Keterbatasan ketersediaan data tersebut menghambat pelaksanaan analisis gender secara menyeluruh di tingkat daerah, sehingga upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan partisipasi, akses, manfaat, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan dalam program pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal.

   Selain itu, belum adanya sistem pendataan yang terintegrasi dan terstandar menyebabkan data yang dikumpulkan oleh Balai Besar POM di Samarinda belum dan program yang berperspektif gender, termasuk dalam pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat, karena belum berbasis pada bukti empiris yang kuat. Dengan

tersedianya data terpilah yang akurat dan konsisten, Balai Besar POM di Samarinda akan lebih mampu menyusun strategi intervensi yang responsif gender dan mendukung pencapaian tujuan pengarusutamaan gender di lingkungan BPOM secara keseluruhan.

5. **Masih lemahnya kebijakan dan dukungan sarana prasarana terhadap dampak perubahan iklim**

   Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda adalah masih terbatasnya kebijakan serta dukungan sarana dan prasarana dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kondisi geografis dan lingkungan di wilayah Kalimantan Timur yang rentan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan suhu ekstrem berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan, terutama yang terkait dengan distribusi, penyimpanan, dan pengujian sampel produk.

   Kebijakan internal terkait mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem manajemen pengawasan maupun perencanaan operasional. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti sistem pendingin yang efisien energi, peralatan laboratorium ramah lingkungan, serta sarana transportasi yang tangguh terhadap kondisi cuaca ekstrem masih menjadi kendala dalam menjaga keberlanjutan dan keandalan layanan pengawasan.

   Keterbatasan ini berdampak pada efisiensi pelaksanaan kegiatan serta potensi peningkatan biaya operasional, khususnya pada saat terjadi gangguan cuaca yang ekstrem atau bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan adaptif dan investasi berkelanjutan dalam penyediaan sarana prasarana yang responsif

terhadap perubahan iklim, agar BBPOM di Samarinda mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam segala kondisi lingkungan.

I.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (opportunity) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BBPOM di Samarinda untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BBPOM di Samarinda untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan:

1. **Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN)**

   Penetapan pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur sesuai UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 merupakan isu stategis yang dapat memberi dampak signifikan terhadap pengawasan obat dan makanan.

   Lokasi IKN berada di kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dengan ditunjuknya kabupaten PPU sebagai lokasi IKN akan mendorong munculnya industri obat dan makanan dan peningkatan ragam obat dan makanan yang beredar di wilayah IKN dan tentunya bisa menyebar ke wilayah provinsi Kalimantan Timur yang menjadi ranah pengawasan BBPOM Di Samarinda. Peningkatan ragam obat dan makanan yang beredar di IKN dan provinsi Kalimantan Timur membuat BBPOM di Samarinda harus meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasannya untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar di wilayah

tersebut aman, bermutu, dan efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang kedepannya bagi Balai Besar POM di Samarinda. Peran Balai Besar POM di Samarinda dalam pengawasan Obat dan Makanan harus ditingkatkan baik dari kompetensi dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana, maupun koordinasi dengan lintas sektor.

2. **Meningkatnya pengembangan pasar dan daya saing industri serta produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Kalimantan Timur**

   Balai Besar POM di Samarinda turut merasakan dampak positif dari pengembangan pasar dan meningkatnya daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Kalimantan Timur. Kondisi ini mendorong peningkatan volume dan variasi produk yang beredar, sehingga memperluas ruang lingkup pengawasan yang perlu dilakukan. Di sisi lain, hal ini juga membuka peluang bagi Balai Besar POM di Samarinda untuk memperkuat perannya dalam mendampingi pelaku usaha lokal agar mampu memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat produk sesuai regulasi yang berlaku. Melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, serta pendampingan teknis, Balai Besar POM di Samarinda berperan penting dalam mendorong tumbuhnya industri sediaan farmasi dan pangan olahan yang berdaya saing tinggi, berbasis potensi lokal, dan berorientasi ekspor. Dengan demikian, pertumbuhan pasar tidak hanya menjadi tantangan pengawasan, tetapi juga menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekosistem industri sehat dan inovatif di wilayah Kalimantan Timur.

3. **Pemanfaatan kemajuan teknologi melalui optimalisasi digitalisasi dalam seluruh proses bisnis**

   Balai Besar POM di Samarinda turut terdampak sekaligus

mendapatkan peluang strategis dari upaya Pemanfaatan kemajuan teknologi melalui optimalisasi digitalisasi dalam seluruh proses bisnis. Implementasi digitalisasi membuka ruang bagi Balai Besar POM di Samarinda untuk memperkuat efisiensi kerja, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses pengawasan di wilayah Kalimantan Timur. Melalui integrasi sistem informasi pengawasan dan pemanfaatan teknologi seperti data analytics serta machine learning, UPT dapat melakukan pemantauan dan deteksi risiko secara lebih akurat dan real-time. Selain itu, digitalisasi juga mendorong transformasi budaya kerja menuju layanan berbasis data, memperkuat koordinasi antar unit, dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan dukungan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas SDM, Balai Besar POM di Samarinda berpotensi menjadi salah satu pelaksana utama digital transformation di tingkat daerah, yang berkontribusi langsung pada terwujudnya ekosistem pengawasan yang modern, adaptif, dan berbasis bukti di lingkungan BPOM.

4. **Kemitraan Strategis dengan para pemangku kepentingan**

Dalam menghadapi tantangan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya, Balai Besar POM di Samarinda telah memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha lokal untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif dan partisipatif. Melalui forum koordinasi pengawasan obat dan makanan daerah, kegiatan pendampingan industri kecil dan menengah (IKM), serta program edukasi masyarakat bersama instansi terkait, Balai Besar POM di Samarinda berperan aktif dalam memperluas jejaring kolaboratif yang mendukung implementasi kebijakan BPOM secara nasional. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi di wilayah

Kalimantan Timur juga membuka peluang pengembangan riset terapan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan demikian, kolaborasi strategis yang dijalankan BPOM di tingkat pusat turut memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pengawasan dan pemberdayaan di daerah, termasuk di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan Tahun 2025 Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan telah terbentuk pada seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerja BBPOM di Samarinda pada provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Mahakam Ulu.

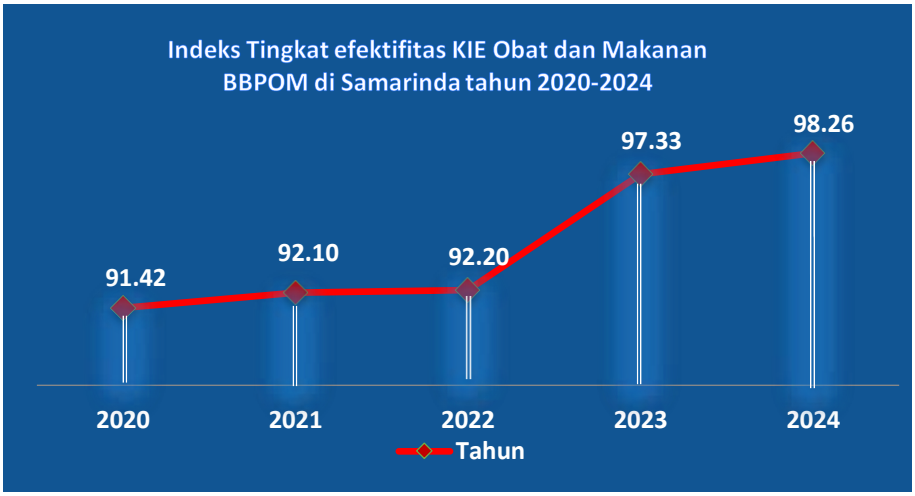
5. **Antusiasme masyarakat yang kuat dalam turut mengawasi sediaan farmasi dan pangan olahan**

   Melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilaksanakan di wilayah Kalimantan Timur, Balai Besar POM di Samarinda aktif menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan edukasi keamanan pangan dan obat. Antusiasme masyarakat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan KIE, seperti sosialisasi Cek KLIK, Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat), dan kampanye pangan aman, menunjukkan meningkatnya kesadaran

publik terhadap pentingnya pengawasan bersama.

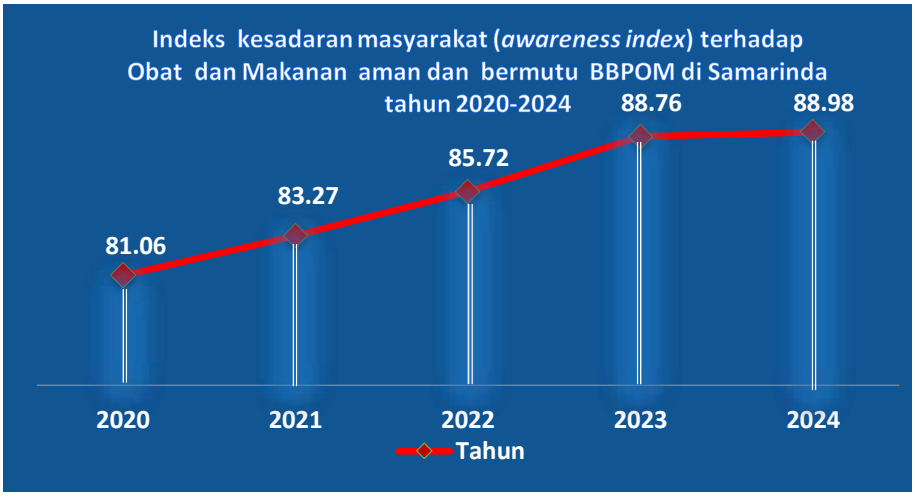
Partisipasi masyarakat ini memberikan dampak nyata dalam memperkuat sistem pengawasan berbasis komunitas, di mana masyarakat berperan sebagai early warning system dalam mendeteksi dan melaporkan potensi pelanggaran di lapangan. Dengan dukungan masyarakat yang semakin peduli, Balai Besar POM di Samarinda mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempercepat respons terhadap laporan dugaan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan upaya BPOM secara nasional untuk membangun ekosistem pengawasan yang kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan demi mewujudkan perlindungan masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan.

Indeks efektivitas KIE diperoleh melalui survei efektivitas KIE kepada responden yang pernah menerima KIE Balai Besar POM di Samarinda. Capaian indeks efektivitas KIE pada kurun waktu Tahun 2020-2024 terus meningkat, Pada tahun 2024, indeks efektivitas KIE mencapai 98,26 (sembilan puluh enam koma dua puluh enam) atau berada pada kategori Sangat Efektif. Berdasarkan capaian indeks efektivitas KIE tahun 2020-2024 terlihat bahwa terjadi peningkatan untuk setiap komponen indikatornya.



Gambar 1.36 Indeks Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Samarinda tahun 2020-2024

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Peningkatan kesadaran masyarakat terlihat dari Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu. Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu diperoleh melalui survei ke responden masyarakat ditunjukkan melalui pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Capaian indeks kesadaran masyarakat terus meningkat dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu mencapai 88,98 (delapan puluh delapan koma sembilan puluh delapan) pada kategori baik. Berdasarkan capaian indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu tahun 2020-2024 terlihat bahwa terjadi peningkatan untuk setiap komponen indikatornya.



Gambar 1.37 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM di Samarinda tahun 2020-2024

Indikator yang paling tinggi kontribusinya adalah pengetahuan masyarakat. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara Balai Besar POM di Samarinda dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan Balai Besar POM di Samarinda untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi Balai Besar POM di Samarinda sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

6. **Perkembangan kebijakan kesehatan global dan arus perdagangan bebas yang mendorong harmonisasi regulasi serta penguatan daya saing produk nasional**

   Balai Besar POM di Samarinda juga terdampak langsung oleh dinamika perkembangan kebijakan kesehatan global dan

perdagangan bebas, khususnya dalam upaya harmonisasi regulasi dan peningkatan daya saing produk nasional di wilayah Kalimantan Timur. Dalam konteks ini, Balai Besar POM di Samarinda berperan penting dalam mengawal implementasi standar pengawasan yang sejalan dengan regulasi internasional dan kebijakan nasional. Melalui kegiatan pengawasan, pembinaan pelaku usaha, serta edukasi kepada masyarakat dan industri lokal, Balai Besar POM di Samarinda mendukung terwujudnya ekosistem usaha yang berdaya saing tinggi dan memenuhi standar keamanan, mutu, serta manfaat yang diakui secara global.

Selain itu, Balai Besar POM di Samarinda turut berperan dalam memperkuat kapasitas industri lokal agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan harmonisasi standar internasional seperti Good Manufacturing Practice (GMP), Codex Alimentarius, dan regulasi ASEAN terkait obat tradisional, suplemen kesehatan, serta pangan olahan. Peran aktif ini menjadi bagian dari kontribusi nyata BPOM dalam mendukung pencapaian status WHO Listed Authority (WLA), serta dalam memfasilitasi kesiapan pelaku usaha daerah agar dapat bersaing di pasar regional dan global.

Melalui pendekatan yang kolaboratif dan edukatif, Balai Besar POM di Samarinda berkontribusi dalam memastikan bahwa produk lokal tidak hanya aman untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia, tetapi juga memiliki kualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional. Dengan demikian, keterlibatan aktif Balai Besar POM di Samarinda menjadi refleksi nyata dari semangat harmonisasi regulasi dan peningkatan daya saing produk nasional yang diusung oleh BPOM dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perdagangan bebas.

7. **Pengembangan pola produksi serta konsumsi pangan olahan yang berkelanjutan**

Balai Besar POM di Samarinda turut terdampak dan berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan produksi dan konsumsi pangan olahan yang berkelanjutan di wilayah Kalimantan Timur. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan produk pangan olahan berbasis sumber daya alam lokal, seperti hasil perkebunan, perikanan, dan tanaman herbal khas daerah. Dengan potensi tersebut, Balai Besar POM di Samarinda berperan strategis dalam memastikan bahwa praktik produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal tidak hanya memenuhi aspek keamanan dan mutu, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri pangan olahan, Balai Besar POM di Samarinda mendorong penerapan konsep ekonomi sirkular, termasuk penggunaan bahan baku yang berkelanjutan dan inovasi kemasan ramah lingkungan. Upaya ini selaras dengan arah kebijakan nasional dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN ES), serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau di tingkat daerah. Selain itu, Balai Besar POM di Samarinda juga berkontribusi dalam peningkatan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

Dengan demikian, keterlibatan Balai Besar POM di Samarinda dalam mendorong penerapan prinsip keberlanjutan tidak hanya memperkuat pelaksanaan kebijakan nasional BPOM, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem industri pangan olahan yang tangguh, inovatif, dan berwawasan lingkungan di Kalimantan Timur dan sekitarnya.

8. **Pengembangan terobosan baru dalam produk dan pelayanan kesehatan**

Balai Besar POM di Samarinda turut terdampak dan berperan aktif dalam mendukung kebijakan inovasi produk dan layanan kesehatan di wilayah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan obat bahan alam, kosmetik berbasis bahan lokal, serta produk pangan fungsional yang berasal dari kekayaan biodiversitas tropis. Dalam konteks ini, Balai Besar POM di Samarinda berperan penting dalam memastikan bahwa setiap inovasi yang dihasilkan oleh pelaku usaha, peneliti, maupun perguruan tinggi daerah berjalan sesuai dengan prinsip keamanan, mutu, dan manfaat yang berlandaskan bukti ilmiah.

Melalui kegiatan pendampingan riset dan hilirisasi hasil pengembangan bahan alam, Balai Besar POM di Samarinda memfasilitasi pelaku usaha serta akademisi dalam memahami regulasi, penyusunan protokol uji, dan persiapan perizinan produk inovatif, seperti obat bahan alam terstandar, fitofarmaka, maupun kosmetik berbahan alami khas Kalimantan. Selain itu, BBPOM di Samarinda juga berperan dalam pengawasan dan standardisasi produk pangan inovatif, termasuk pangan fungsional dan produk olahan hasil bioteknologi, agar dapat memenuhi ketentuan keamanan dan mutu sebelum beredar di masyarakat.

Keterlibatan aktif BBPOM di Samarinda tidak hanya memperkuat ekosistem inovasi di tingkat daerah, tetapi juga mendorong terwujudnya kemandirian bahan baku obat dan pangan nasional melalui kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku industri lokal. Dengan demikian, inovasi produk dan layanan kesehatan tidak hanya meningkatkan

daya saing industri daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan kesehatan nasional serta pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kalimantan Timur dan sekitarnya.

9. Percepatan Transformasi Digital nasional

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, Balai Besar POM di Samarinda juga terdampak secara langsung oleh kebijakan Percepatan Transformasi Digital Nasional yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. Transformasi ini menuntut seluruh UPT, termasuk BBPOM di Samarinda, untuk beradaptasi dengan sistem layanan berbasis elektronik yang terintegrasi dan interoperabel dengan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.

Balai Besar POM di Samarinda berperan dalam mendukung keterpaduan layanan digital BPOM melalui implementasi sistem pengawasan berbasis data dan teknologi informasi, termasuk pemanfaatan INApas sebagai layanan identitas digital terpadu serta Portal Pelayanan Publik (INAku) dalam penyediaan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan penerapan transformasi digital, BBPOM di Samarinda diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pengawasan, mempercepat pelayanan publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Timur.

Selain itu, BBPOM di Samarinda juga menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam melakukan penyesuaian infrastruktur digital, peningkatan kompetensi SDM, dan integrasi sistem informasi pengawasan daerah dengan sistem pusat. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang cerdas, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mendukung BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan yang unggul dan terpercaya di era digital.

10. Penerapan Teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, Balai Besar POM di Samarinda juga terdampak secara langsung oleh penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Implementasi teknologi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya, terutama mengingat wilayah pengawasan yang luas serta tantangan distribusi lintas kabupaten dan perbatasan antarprovinsi.

Melalui pemanfaatan teknologi IoT, Balai Besar POM di Samarinda dapat meningkatkan efektivitas pengawasan rantai pasok sediaan farmasi dan pangan olahan secara real-time, termasuk pemantauan suhu dan kelembaban pada produk yang memerlukan penyimpanan khusus, serta pelacakan distribusi produk dari produsen hingga ke titik penjualan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Integrasi data dari perangkat IoT juga memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan distribusi, seperti penyalahgunaan atau pemalsuan obat dan pangan olahan.

Selain itu, penerapan IoT mendukung transformasi digital pengawasan di lingkungan BBPOM Samarinda melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan respon terhadap temuan lapangan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BBPOM Samarinda tidak hanya memperkuat sistem pengawasan di daerah,

tetapi juga berkontribusi langsung pada pengembangan sistem pengawasan nasional yang modern, berbasis risiko, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

11. **Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi menjadikan BBPOM di Samarinda sebagai sumber referensi yang valid dalam mencari informasi terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Di tengah derasnya arus informasi dan berkembangnya disinformasi terutama di ruang digital, masyarakat semakin membutuhkan kehadiran sebuah lembaga yang mampu memberikan data dan informasi yang akurat dan mudah diakses. Informasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang disajikan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, visualisasi yang menarik, serta memenuhi unsur benar dan valid, akan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus minat media dan publik untuk melakukan amplifikasi informasi yang lebih luas lagi.

Dengan pengelolaan komunikasi dan sumber informasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang terpercaya, adaptif, berbasis data, edukatif, persuasif, mudah dipahami, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara real-time, BBPOM di Samarinda dapat semakin memperkuat kepercayaan publik dan menempatkan diri sebagai sumber referensi dan rujukan utama informasi sediaan farmasi dan pangan olahan.

Di wilayah Kalimantan Timur, BBPOM di Samarinda menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan informasi yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan daerah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan termasuk keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan membuka peluang besar bagi BBPOM di Samarinda untuk menjadi sumber referensi dan rujukan

utama masyarakat dalam memperoleh informasi yang valid dan terpercaya terkait sediaan farmasi dan pangan olahan di Kalimantan Timur.

Melalui berbagai kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), BBPOM di Samarinda aktif mendiseminasikan informasi terkait keamanan obat dan makanan, klarifikasi hoaks, serta hasil pengawasan di daerah, baik melalui media sosial resmi, kolaborasi dengan media lokal, maupun kegiatan langsung di masyarakat. Upaya ini sejalan dengan strategi komunikasi nasional kataBPOM (bukan kata orang, pastikan kataBPOM), yang memperkuat citra BPOM sebagai lembaga kredibel dan berintegritas tinggi dalam memberikan informasi publik.

Selain itu, BBPOM di Samarinda juga berperan dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di daerah melalui pelayanan informasi yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kanal komunikasi digital, BBPOM di Samarinda memastikan masyarakat di Kalimantan Timur dapat memperoleh informasi resmi mengenai legalitas, keamanan, dan mutu produk sediaan farmasi serta pangan olahan tanpa harus bergantung pada sumber yang tidak terverifikasi.

12. Implementasi program Makan Bergizi Gratis memberikan peluang peningkatan peran BBPOM dalam penguatan sistem pengawasan pangan yang aman dan bergizi di tingkat daerah

Dalam pelaksanaan kebijakan nasional Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Kalimantan Timur, Balai Besar POM di Samarinda memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh bahan baku pangan

olahan, sarana produksi, serta distribusi pangan dalam program MBG memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.

Melalui kegiatan pengawasan, sampling, pemeriksaan sarana, serta pendampingan teknis kepada pelaku usaha pangan lokal, Balai Besar POM di Samarinda turut berkontribusi dalam menjamin bahwa makanan bergizi yang disalurkan dalam program tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai sasaran utama. Selain itu, Balai Besar POM di Samarinda juga melakukan edukasi dan pembinaan kepada penyedia layanan makanan bergizi di daerah, agar memahami prinsip higiene dan sanitasi pangan serta penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Kebijakan nasional melalui Program MBG ini tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan BPOM, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas sektor antara Balai Besar POM di Samarinda dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta lembaga masyarakat di wilayah kerja. Dengan sinergi ini, Balai Besar POM di Samarinda berperan aktif dalam memastikan keberhasilan program MBG sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat melalui pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

I.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BBPOM di Samarinda. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BBPOM di Samarinda dapat merancang langkah-langkah

mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (Threat) yang dapat mempengaruhi BBPOM di Samarinda dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. **Revolusi Industri 5.0 yang dapat mengubah pola budaya masyarakat**

   Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (society 5.0) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk sediaan farmasi dan pangan olahan.

   Di wilayah Kalimantan Timur, tren peredaran produk melalui platform digital semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan e-commerce lokal dan regional. Kondisi ini memunculkan tantangan baru dalam pengawasan, di mana produk-produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi standar mutu dan keamanan kerap dipasarkan secara daring tanpa izin edar yang sah.

   Balai Besar POM di Samarinda perlu memperkuat sistem intelijen pengawasan berbasis digital dengan melakukan pemantauan siber (cyber patrol) terhadap aktivitas penjualan daring produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu, kerja sama lintas sektor dengan instansi seperti Kepolisian, Kominfo, dan Dinas Kesehatan daerah menjadi sangat penting untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran di ruang siber.

   Sebagai garda terdepan BPOM di daerah, Balai Besar POM di Samarinda juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih cerdas dan kritis dalam membeli produk secara daring, serta mampu mengenali ciri-ciri produk ilegal. Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional BPOM dalam memperkuat sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berbasis

digital yang adaptif terhadap dinamika era teknologi informasi.

Dengan demikian, ancaman kejahatan siber tidak hanya menjadi tantangan bagi BPOM secara nasional, tetapi juga menuntut kesiapan Balai Besar POM di Samarinda dalam mengembangkan kemampuan pengawasan berbasis teknologi dan meningkatkan kolaborasi untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat peredaran produk ilegal di ruang digital.

2. **Tantangan terhadap Adaptasi Sistem Pengawasan terhadap dinamika pasar yang kian pesat**

Dinamika pasar yang cepat dalam industri sediaan farmasi dan pangan olahan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan. Di wilayah Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi daerah yang pesat, terutama di sektor industri dan perdagangan, mendorong meningkatnya peredaran berbagai produk baru — baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor. Kondisi ini menuntut Balai Besar POM di Samarinda untuk terus memperkuat kapasitas pengawasan, terutama dalam hal kecepatan respon terhadap munculnya produk-produk inovatif dengan teknologi baru seperti bioteknologi, suplemen fungsional, dan pangan olahan modern.

Balai Besar POM di Samarinda perlu mengadaptasi sistem pengawasan yang lebih responsif dan berbasis risiko, dengan dukungan teknologi informasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengujian laboratorium dan evaluasi produk. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan akademisi menjadi semakin penting untuk memastikan proses pengawasan berjalan selaras dengan dinamika pasar di daerah.

Percepatan dinamika pasar ini juga menuntut Balai Besar POM di Samarinda untuk memperkuat fungsi intelijen pasar dan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi produk bermasalah yang beredar. Dengan langkah tersebut, pengawasan dapat dilakukan secara proaktif dan antisipatif, bukan hanya reaktif terhadap pelanggaran yang sudah terjadi.

Dengan demikian, perubahan cepat dalam pasar sediaan farmasi dan pangan olahan tidak hanya menjadi tantangan bagi BPOM secara nasional, tetapi juga menuntut kesiapan Balai Besar POM di Samarinda untuk bertransformasi menjadi institusi pengawasan yang adaptif, inovatif, dan mampu merespons perkembangan industri secara cepat dan tepat demi melindungi kesehatan masyarakat.

3. **Penyebaran Hoaks terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang kian marak**

   BBPOM di Samarinda sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memiliki tugas salah satunya melakukan edukasi kepada masyarakat agar bijak dalam mengakses, memilih, dan menyebarkan informasi sediaan farmasi dan pangan olahan agar terhindar dari hoaks.

   Penyebaran informasi menyesatkan mengenai obat, suplemen, kosmetik, maupun pangan olahan banyak beredar melalui media sosial dan platform digital lokal, sering kali tanpa dasar ilmiah dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi Balai Besar POM di Samarinda dalam menjalankan fungsi edukasi dan pengawasan, terutama ketika hoaks tersebut berkaitan dengan isu sensitif seperti bahan

berbahaya dalam pangan, klaim berlebihan pada suplemen, atau promosi produk tanpa izin edar yang mengatasnamakan “alami” dan “aman”.

Untuk menanggulangi ancaman tersebut, Balai Besar POM di Samarinda terus memperkuat strategi komunikasi publik dan literasi kesehatan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara luring maupun daring. Selain itu, upaya kolaboratif dengan pemerintah daerah, media lokal, akademisi, dan komunitas digital dilakukan untuk memperluas jangkauan edukasi dan memperkuat branding informasi resmi BPOM melalui kampanye #KataBPOM, agar masyarakat semakin mengenali sumber informasi yang valid dan terpercaya.

Balai Besar POM di Samarinda juga aktif dalam melakukan pemantauan siber (cyber patrol) terhadap konten daring yang berpotensi menyesatkan atau menjual produk ilegal di wilayah kerjanya. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar penegakan hukum dan klarifikasi publik agar masyarakat mendapatkan kepastian informasi yang benar.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Balai Besar POM di Samarinda tidak hanya berperan sebagai pengawas produk, tetapi juga sebagai penjaga kredibilitas informasi publik di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPOM dan memastikan masyarakat Kalimantan Timur terlindungi dari dampak negatif penyebaran hoaks yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan.

4. **Krisis kesehatan global**

Dalam kondisi darurat Krisis Kesehatan Global seperti pandemi, Balai Besar POM di Samarinda harus menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan, alat kesehatan, serta produk pangan olahan yang aman dan berkualitas. Kondisi tersebut menuntut peningkatan intensitas pengawasan baik terhadap produk yang beredar di pasar konvensional maupun daring. Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan instansi daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pelaku usaha menjadi semakin penting untuk memastikan kelancaran distribusi produk dan mencegah beredarnya produk ilegal atau tidak memenuhi standar.

Krisis kesehatan global juga menimbulkan tantangan bagi Balai Besar POM di Samarinda dalam menjaga kecepatan dan ketepatan layanan publik, terutama dalam hal penerbitan izin edar, pengujian laboratorium, serta komunikasi risiko kepada masyarakat. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, Balai Besar POM di Samarinda dituntut untuk tetap adaptif, responsif, dan inovatif dalam memastikan perlindungan masyarakat dari risiko kesehatan yang timbul akibat perubahan kondisi global.

5. **Kecenderungan peningkatan kasus penyakit tidak menular di masyarakat**

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, stroke, dan kanker, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan survei kesehatan nasional, beban PTM terus mengalami lonjakan, baik dari sisi prevalensi maupun dampak ekonominya terhadap sistem kesehatan nasional.

Perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung tinggi terhadap pangan olahan, minuman berpemanis, serta gaya hidup yang kurang aktif menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan produk yang beredar di daerah. Kondisi ini mendorong Balai Besar POM di Samarinda untuk memperkuat pengawasan terhadap produk pangan olahan tinggi gula, garam, dan lemak, serta melakukan edukasi publik secara masif terkait pentingnya membaca label pangan dan memilih produk yang lebih sehat.

Selain itu, peningkatan konsumsi suplemen kesehatan dan produk berklaim di masyarakat juga memerlukan kewaspadaan lebih tinggi dari Balai Besar POM di Samarinda terhadap potensi peredaran produk ilegal atau dengan klaim berlebihan yang menyesatkan. Melalui kegiatan pengawasan pre-market dan post-market, serta pemanfaatan kanal digital, Balai Besar POM di Samarinda berperan penting dalam memastikan bahwa produk yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Upaya ini diperkuat dengan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang melibatkan lintas sektor seperti dinas kesehatan, instansi pendidikan, dan pelaku usaha lokal. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dan konsumsi pangan yang aman serta bergizi seimbang sebagai bagian dari strategi pencegahan PTM di daerah. Dengan demikian, Balai Besar POM di Samarinda tidak hanya menjadi garda pengawasan, tetapi juga mitra strategis dalam mendukung kebijakan nasional pengendalian penyakit tidak menular dan pencapaian target pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2045.

6. **Perubahan demografi dan epidemiologi**

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk BBPOM di Samarinda. Pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, serta peningkatan proporsi penduduk usia lanjut di daerah ini membawa konsekuensi terhadap pola konsumsi produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap obat untuk penyakit degeneratif, suplemen kesehatan, serta pangan fungsional menuntut Balai Besar POM di Samarinda untuk memperkuat strategi pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko.

Selain itu, dinamika epidemiologi seperti munculnya kembali penyakit menular tertentu dan meningkatnya kasus penyakit kronis menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai distribusi obat, vaksin, serta produk kesehatan lainnya. Balai Besar POM di Samarinda juga perlu memperkuat kapasitas laboratorium dan sumber daya manusia dalam menghadapi kompleksitas pengujian produk baru yang relevan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat yang terus berubah.

Melalui sinergi dengan instansi kesehatan daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya, Balai Besar POM di Samarinda berperan aktif dalam memantau tren konsumsi dan risiko produk di masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengawasan dan regulasi tetap responsif terhadap perubahan struktur demografi dan pola penyakit di wilayah kerja. Dengan demikian, Balai Besar POM di Samarinda menjadi bagian integral dalam upaya BPOM menjaga efektivitas sistem pengawasan nasional di tengah pergeseran dinamika kesehatan masyarakat yang semakin kompleks

7. **Ancaman bioterorisme**

Balai Besar POM di Samarinda juga berpotensi terdampak oleh ancaman bioterorisme, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap rantai pasok sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Kalimantan Timur. Posisi strategis provinsi ini sebagai salah satu pusat industri dan jalur distribusi barang lintas pulau menjadikannya rentan terhadap potensi penyalahgunaan bahan atau produk yang dapat digunakan untuk aksi bioterorisme. Dalam situasi seperti ini, Balai Besar POM di Samarinda dituntut untuk memiliki kemampuan deteksi dini dan respon cepat terhadap temuan produk yang mencurigakan atau mengandung agen berbahaya.

Selain itu, tantangan ini juga memperkuat urgensi peningkatan kapasitas laboratorium pengujian serta kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan analisis terhadap bahan aktif dan mikroorganisme berisiko tinggi. Balai Besar POM di Samarinda perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memastikan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi ancaman bioterorisme.

Melalui peningkatan kemampuan deteksi laboratorium, sistem pelaporan kejadian luar biasa, serta mekanisme komunikasi risiko yang cepat dan akurat, Balai Besar POM di Samarinda berperan penting dalam mendukung BPOM menjaga keamanan nasional dari aspek pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Upaya ini sejalan dengan komitmen BPOM dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan dan kepercayaan publik terhadap keamanan produk di era ancaman non-tradisional yang semakin kompleks.

8. **Isu dan pemberitaan bertonasi negatif mengenai BPOM di media dan media sosial dapat mempengaruhi opini publik**

   Di era digital saat ini, persepsi publik terhadap lembaga pemerintah

sangat mudah dibentuk dan dipengaruhi oleh narasi yang beredar di media, khususnya media sosial. Balai Besar POM di Samarinda juga merasakan langsung dampak dari munculnya isu dan pemberitaan bertonasi negatif terhadap BPOM di berbagai media, baik nasional maupun lokal. Di tingkat daerah, pemberitaan negatif semacam ini sering kali memunculkan persepsi publik yang keliru terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh UPT, termasuk di wilayah Kalimantan Timur. Munculnya opini publik yang bias atau tidak berdasar dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengawasan, efektivitas penegakan hukum, serta kredibilitas lembaga dalam memberikan jaminan keamanan produk obat dan makanan.

Balai Besar POM di Samarinda dalam beberapa kesempatan harus melakukan langkah-langkah klarifikasi dan edukasi publik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan berbasis data. Tantangan ini semakin besar karena kecepatan arus informasi di media sosial lokal tidak jarang menimbulkan disinformasi yang menyebar luas sebelum adanya penjelasan resmi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kehumasan dan komunikasi publik di tingkat UPT menjadi sangat penting agar pesan yang disampaikan lebih cepat, faktual, dan menarik minat publik.

Selain itu, Balai Besar POM di Samarinda juga terus memperkuat koordinasi dengan media lokal, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat untuk membangun ekosistem komunikasi yang sehat dan kolaboratif. Upaya ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi defensif menghadapi pemberitaan negatif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya proaktif membangun citra positif BPOM sebagai lembaga yang transparan, responsif, dan berpihak pada

perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan komunikasi publik yang adaptif di tingkat daerah menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kepercayaan dan legitimasi BPOM di mata masyarakat.

9. **Tren penggunaan antimikroba yang tidak rasional Pemicu Resistensi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance* (AMR)**

Resistensi antimikroba merupakan ancaman serius dan semakin mendesak bagi pengawasan obat dan pangan di Indonesia. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, Balai Besar POM di Samarinda turut menghadapi tantangan yang signifikan dalam pengawasan terhadap potensi resistensi antimikroba (AMR), khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang memiliki aktivitas peternakan, perikanan, dan pertanian yang cukup tinggi. Penggunaan antibiotik dan antimikroba pada sektor-sektor tersebut, baik untuk tujuan pengobatan maupun peningkatan produktivitas, berpotensi meninggalkan residu pada produk pangan asal hewan maupun tumbuhan yang beredar di masyarakat.

Kondisi ini menuntut Balai Besar POM di Samarinda untuk memperkuat fungsi pengawasan, terutama melalui kegiatan sampling dan pengujian terhadap produk pangan yang berisiko mengandung residu antimikroba, serta terhadap obat hewan dan sediaan farmasi yang beredar di wilayah setempat. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya laboratorium dan perlunya peningkatan kapasitas pengujian yang mampu mendeteksi berbagai jenis residu dan pola resistensi mikroba secara lebih cepat dan akurat.

Balai Besar POM di Samarinda juga berperan aktif dalam upaya pencegahan resistensi antimikroba melalui edukasi dan komunikasi risiko kepada pelaku usaha, tenaga kesehatan, serta

masyarakat umum mengenai bahaya penggunaan antibiotik tanpa resep dan pentingnya pola konsumsi pangan yang aman. Upaya ini sejalan dengan pendekatan One Health yang mengintegrasikan aspek kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk menekan laju peningkatan AMR di daerah.

Dengan demikian, isu resistensi antimikroba bukan hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga menjadi tantangan nyata di tingkat daerah, termasuk bagi Balai Besar POM di Samarinda. Penguatan kapasitas pengawasan, laboratorium, dan kolaborasi lintas sektor di daerah menjadi kunci dalam mendukung kebijakan nasional pengendalian AMR serta menjaga ketahanan sistem kesehatan dan pangan di Indonesia.

10. **Risiko serangan siber dan kebocoran data yang semakin meningkat**

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pelayanan publik, serta komunikasi data dan pelaporan berbasis sistem elektronik, Balai Besar POM di Samarinda mengelola berbagai informasi penting, termasuk data hasil pengujian laboratorium, data registrasi produk, dan data pelaku usaha yang bersifat rahasia.

Meningkatnya penggunaan aplikasi internal, sistem informasi pengawasan, serta integrasi data antara pusat dan daerah menjadikan infrastruktur digital Balai Besar POM di Samarinda semakin rentan terhadap ancaman keamanan siber. Risiko seperti phishing, ransomware, maupun malware injection dapat mengakibatkan gangguan operasional yang berdampak pada keterlambatan layanan publik, terganggunya proses pengawasan, bahkan potensi kehilangan atau kebocoran data sensitif.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan

kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi serta perlunya penguatan kebijakan dan prosedur pengelolaan data secara aman. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran keamanan siber (cybersecurity awareness) di seluruh jajaran pegawai serta penguatan infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan standar keamanan data pemerintah.

Dengan demikian, Balai Besar POM di Samarinda menjadi bagian penting dalam upaya BPOM untuk memperkuat ketahanan siber nasional melalui penerapan tata kelola keamanan informasi yang lebih ketat, peningkatan koordinasi dengan unit pusat, serta partisipasi aktif dalam sistem deteksi dini dan respons insiden siber di lingkungan pemerintahan. Langkah-langkah ini penting agar layanan publik, data pengawasan, serta kepercayaan masyarakat terhadap BPOM tetap terjaga di tengah meningkatnya ancaman digital.

11. Ketimpangan gender di berbagai sektor

Berdasarkan data Global Inequality Index, Indonesia berada pada rangking 113 (seratus tiga belas) secara global dengan nilai ketidaktimpangan sebesar 0,728 (nol koma tujuh ratus dua puluh delapan) Index ini dibangun oleh dimensi kesehatan, pemberdayaan dan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS (2024), pada tahun 2024 nilai Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,421 (nol koma empat ratus dua puluh satu) turun sebesar 0,026 (nol koma nol dua puluh enam) poin dari tahun 2023 sebesar 0,447 (nol koma empat ratus empat puluh tujuh), namun berdasarkan pembandingan data Indeks Pembangunan Gender antara tahun 2023 dan 2024, kenaikan nilai terjadi secara lambat dan tidak ada perubahan secara agregat. Ketimpangan gender yang tinggi berdampak sistemik terhadap efektivitas pengawasan sediaan

farmasi dan pangan olahan, seperti adanya ketimpangan akses informasi kritis, perbedaan kebutuhan kesehatan yang kurang diakomodasi, representasi gender di tenaga pengawas dan sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, kesenjangan perlindungan konsumen, dan lain-lain.

Balai Besar POM di Samarinda juga merasakan dampak dari masih tingginya ketimpangan gender di berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketimpangan gender dapat berimplikasi pada terbatasnya partisipasi dan representasi perempuan dalam jabatan fungsional maupun struktural, khususnya pada posisi strategis yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Selain itu, dalam konteks pelaksanaan program edukasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kalimantan Timur, ketimpangan gender juga berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan penyuluhan, advokasi, dan fasilitasi pelaku usaha. Perbedaan peran sosial dan akses ekonomi antara laki-laki dan perempuan sering kali memengaruhi tingkat partisipasi dan penerimaan informasi terkait keamanan pangan dan obat, terutama di daerah dengan karakteristik sosial-budaya yang masih memegang kuat peran tradisional gender.

Di sisi lain, Balai Besar POM di Samarinda juga menghadapi tantangan dalam upaya mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dan responsif gender. Diperlukan strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang lebih sistematis, termasuk peningkatan kapasitas pegawai terkait perspektif gender, pelibatan setara dalam kegiatan pengawasan, serta penyusunan data terpilah

berdasarkan jenis kelamin untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Dengan demikian, ketimpangan gender menjadi ancaman yang tidak hanya berdampak pada kesetaraan internal kelembagaan, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan BPOM secara keseluruhan. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Samarinda terus berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan PUG dan mewujudkan tata kelola yang adil, inklusif, serta berkeadilan gender dalam mendukung tujuan strategis BPOM lima tahun ke depan.

12. Risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena pemberian MBG

Tantangan dalam mengantisipasi meningkatnya risiko insiden atau Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makanan Bergizi untuk Anak Sekolah (MBG) juga dialami oleh Balai Besar POM di Samarinda Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Mengingat wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda mencakup Provinsi Kalimantan Timur dengan kondisi geografis yang luas dan karakteristik distribusi pangan yang beragam, potensi terjadinya penyimpangan mutu pangan pada rantai penyediaan dan distribusi MBG menjadi risiko yang nyata.

Keterbatasan sarana pengawasan di daerah terpencil, perbedaan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta variasi kemampuan pelaku pengadaan dan penyedia jasa pangan di tingkat lokal menambah kompleksitas dalam memastikan seluruh proses pemenuhan pangan MBG memenuhi standar keamanan dan higienitas yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Balai Besar POM di Samarinda berperan penting dalam melakukan pembinaan teknis, audit keamanan pangan, serta pengawasan berbasis risiko

terhadap penyelenggaraan program MBG di wilayahnya.

Selain itu, peningkatan risiko KLB KP juga menuntut penguatan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah setempat, untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai pedoman dan standar keamanan pangan nasional. Tindakan cepat dalam investigasi, penelusuran sumber kontaminasi, dan komunikasi risiko kepada masyarakat juga menjadi langkah krusial agar kepercayaan publik terhadap program MBG tetap terjaga.

Dengan demikian, Balai Besar POM di Samarinda memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan keamanan pangan MBG secara menyeluruh di tingkat daerah, sebagai bagian dari upaya BPOM untuk menjaga mutu, keamanan, dan keberlanjutan program nasional yang berdampak langsung terhadap kesehatan anak-anak Indonesia.

13. **Kurangnya kepatuhan terhadap standar pengelolaan limbah sediaan farmasi dari proses produksi hingga konsumsi memicu peningkatan beban pencemaran lingkungan**

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta keterbatasan sarana pengolahan limbah di beberapa daerah, memperburuk dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Di sisi lain, belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pengawasan rantai pasok sediaan farmasi juga menjadi tantangan dalam menekan potensi pencemaran yang dapat berkontribusi pada perubahan iklim.

Situasi ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya risiko kesehatan masyarakat, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem

pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran BBPOM di Samarinda dalam advokasi, pengawasan berbasis risiko, serta kolaborasi dengan instansi lingkungan dan kesehatan untuk memastikan penerapan pengelolaan limbah farmasi yang sesuai standar, guna mendukung upaya mitigasi dampak perubahan iklim dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.



Gambar 1.38 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

- *Visi*
- *Misi*
- *Tujuan*
- *Sasaran Kegiatan*

II.1 VISI

Balai Besar POM di Samarinda sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:



Gambar 2.1 Visi

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan

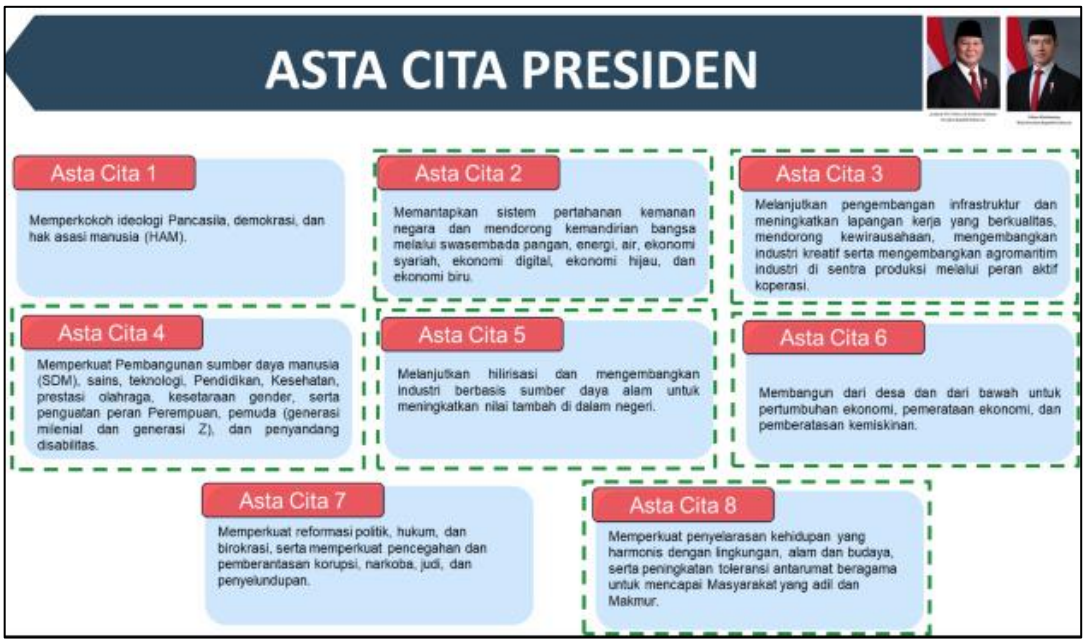
yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

II.2 MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

   Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

   BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

   Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Besar POM di Samarinda sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

II.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia.

Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi

dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Balai Besar POM di Samarinda sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

II.4 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Samarinda, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Samarinda akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di

wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*
g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi

sesuai ketentuan

l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga

terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
c. Jumlah desa pangan aman
d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan

pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
b. Nilai AKIP UPT BPOM
c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan, berikut pemetaan visi, misi dan sasaran strategis BPOM terkait tugas dan fungsi UPT BPOM serta sasaran kegiatan dan indikator Balai Besar POM di Samarinda periode 2025-2029:

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Samarinda periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. *Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu* 2. *Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)* 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. *Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 5. *Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 6. *Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT *Indikator:* 1. *Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 2. *Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* 3. *Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 4. *Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar* 5. *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 6. *Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder* 7. *Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 8. *Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			9. *Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 10. *Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 11. *Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan* 12. *Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar* 13. *Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT* 14. *Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* 15. *Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman* 16. *Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)*
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi *Indikator:* *Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT*
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar*
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM *Indikator:* *Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan*	Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan*	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu *Indikator:* *Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Olahan		
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya efektivitas KIE *Indikator:* 1. *Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT* 2. *Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan* 3. *Jumlah desa pangan aman* 4. *Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas*
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Layanan Publik UPT yang prima *Indikator:* *Indeks Pelayanan Publik UPT*
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal *Indikator:* 1. *Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM* 2. *Nilai AKIP UPT BPOM* 3. *Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM* 4. *Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM*

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan BBPOM di Samarinda 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kegiatan dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BBPOM di Samarinda untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan BBPOM di Samarinda sebagaimana tercantum

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Samarinda

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan, baik oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang menyalurkan tanpa analisis kewajaran, maupun oleh fasilitas pelayanan kefarmasian, diperburuk oleh rendahnya literasi masyarakat. Hal ini berisiko menyebabkan peningkatan resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik yang tidak rasional, dan beban sistem kesehatan yang meningkat	a. Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan kampanye lokal terkait penggunaan antibiotik yang bijak b. Intensifikasi advokasi dan koordinasi lintas sektor	• Tim Kerja Inspeksi • Tim Kerja Infokom
		Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya	a. Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Kosmetik di fasilitas peredaran b. KIE kepada masyarakat c. Sosialisasi kepada pelaku usaha d. Penegakan Hukum	• Tim Kerja Inspeksi • Tim Kerja Infokom • Tim Kerja Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Meningkatnya jumlah kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) di Provinsi Kalimantan Timur.	a. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, Bimtek terhadap Pengawas, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), SPPG, serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB KP. b. Koordinasi dengan BGN terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap SPPI, Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat.	• Tim Kerja Infokom • Tim Kerja Pengujian • Tim Kerja Inspeksi
		Kurangnya pemenuhan komponen Standar Kemampuan Laboratorium (peralatan laboratorium, kompetensi personil, ruang lingkup pengujian dan verifikasi metode analisa) dalam memenuhi kebutuhan pengawasan	Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium, kebutuhuan pelatihan personil, kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang ruang lingkup pengujian dan verifikasi metode analisa	• Tim Kerja Pengujian • Bagian TU
		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan	a. Pendampingan pelaku usaha berupa *desk* dan Bimtek b. Pendampingan oleh petugas BPOM c. Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) terkini pada pelaku usaha d. Pemberian sanksi sesuai ketentuan dan kewenangan berupa peringatan, peringatan keras,	• Tim Kerja Inspeksi • Tim kerja Sertifikasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.	
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh lintas sektor	a. Peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan b. Koordinasi bersama lintas sektor dan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan c. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor	• Tim Kerja Inspeksi • Tim kerja Infokom
		Masih terdapat produk pangan olahan yang beredar di masyarakat yang mengandung bahan berbahaya dan Bahan Tambahan Pangan berlebih dan tidak memenuhi persyaratan mutu lainnya, termasuk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi persyaratan	a. Intensifikasi pengawasan produk pangan olahan di fasilitas peredaran b. KIE kepada masyarakat c. Sosialisasi kepada pelaku usaha d. Penegakan Hukum	• Tim Kerja Inspeksi • Tim Kerja Infokom • Tim Kerja Penindakan
		Inovasi pangan seperti pangan fungsional, pangan berbasis bioteknologi, dan produk rekayasa genetika.	Peningkatan kapasitas laboratorium dan kompetensi penguji	Tim Kerja Pengujian
		Masih kurangnya partisipasi Stakeholder yang terkait dalam kegiatan kabupaten/kota pangan aman	Pendampingan stakeholder terkait dalam melaksanakan kegiatan yang juga menjadi tanggung jawab kabupaten/kota	Tim Kerja Infokom
		Masih banyaknya iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak sesuai ketentuan yang bisa menyesatkan masyarakat dalam memilih produk sediaan farmasi dan pangan olahan	a. Intensifikasi pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan b. KIE kepada masyarakat c. Sosialisasi kepada pelaku usaha d. Koordinasi kepada stakeholder terkait/KPID terkait iklan Obat, OBA,	• Tim kerja Inspeksi • Tim Kerja Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			kuasi, SK di media lokal	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan	a. Pendampingan pelaku usaha berupa *desk* dan Bimtek b. Pendampingan oleh petugas BPOM c. Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) terkini pada pelaku usaha d. Pemberian sanksi sesuai ketentuan dan kewenangan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.	• Tim Kerja Inspeksi • Tim Kerja Sertifkasi
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Amplifikasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah kerja BBPOM di Samarinda dan seluruh kelompok sasaran secara optimal	a. Perencanaan dan Pengelolaan KIE yang optimal b. Monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan KIE dengan *tools*/instrument yang ditetapkan	Tim Kerja Infokom
		Kurangnya komitmen dan keselarasan pemahaman stakeholder terhadap implementasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Advokasi kepada stakeholder dalam rangka implementasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Tim Kerja Infokom
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan UMK Pangan Olahan	a. Inovasi program pendampingan dan edukasi bagi UMKM b. Fasilitasi bimbingan keamanan dan mutu Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam pemenuhan CPOTB Bertahap/CPKB c. Fasilitasi bimbingan keamanan pangan dalam pemenuhan Izin	• Tim Kerja Sertifikasi • Tim Kerja Infokom • Tim Kerja Inspeksi

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			d. Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP- CPPOB). Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan K/L, perguruan tinggi, dan asosiasi untuk menjalin kerja sama terkait dukungan kemandirian UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu.	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan CJS *(Criminal Justice System)* b. Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala c.	Tim Kerja Penindakan
		Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan illegal yang diedarkan secara daring	a. Memperkuat koordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait penerapan kebijakan *Negative List*. b. Penguatan patroli siber c. Publikasi terkait hasil pengawasan patrol siber d.	Tim Kerja Penindakan
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.	a. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber. b. Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Tim Kerja Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Penyusunan pemetaan kerawanan kejahatan di provinsi Kalimantan Timur tidak didukung data lengkap	Perkuatan koordinasi lintas fungsi dan penyediaan tools untuk input data kerawanan	• Tim Kerja Penindakan • Tim Kerja Pengujian • Tim Kerja Inspeksi
7	Layanan Publik UPT yang prima	Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik belum dilakukan secara optimal	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil Forum Konsultasi Publik untuk mengakomodir masukan dari stakeholder	Tim Kerja Infokom
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi b. Sosialisasi *Anti Fraud.* c. Penguatan nilai-nilai anti penyuapan dalam kerangka kerja sistem manajemen pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Bagian TU
		Pemberitaan terkait kinerja BPOM berbagai media, baik cetak, *online*, elektronik dan media sosial bertonasi negatif	Menyebarluaskan informasi kegiatan strategis BPOM kepada media dan lebih terbuka kepada media	• Bagian TU • Tim Kerja Infokom

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

- *Arah Kebijakan dan Strategi BPOM*
- *Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Samarinda*

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG : Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

   Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis yaitu

pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawalan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan

pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/ deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

Balai Besar POM di Samarinda mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak

berizin serta Program MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung Balai Besar POM di Samarinda dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berbasis risiko termasuk penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk Program Makan Bergizi Gratis serta produk dan sarana yang tidak berizin.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif serta melaksanakan penegakan hukum terpadu bekerja sama dengan Criminal Justice System.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dengan pengembangan inovasi jemput bola dalam pendampingan pelaku usaha serta bersinergi dengan lintas sektor untuk mendorong daya saing UMKM.
4. Memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat melalui edukasi, pemanfaatan teknologi digital, dan pengawasan berbasis komunitas guna mendorong kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan obat dan pangan.
5. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan TIK yang modern.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Samarinda termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Samarinda 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berbasis risiko termasuk penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk Program Makan Bergizi Gratis serta produk dan sarana yang tidak berizin

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/ deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif serta melaksanakan penegakan hukum terpadu bekerja sama dengan Criminal Justice System
Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dengan pengembangan inovasi jemput bola dalam pendampingan pelaku usaha serta bersinergi dengan lintas sektor untuk mendorong daya saing UMKM
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat melalui edukasi, pemanfaatan teknologi digital, dan pengawasan berbasis komunitas guna mendorong kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan obat dan pangan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan TIK yang modern
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Samarinda termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Samarinda juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Samarinda melaksanakan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan *pre-market* dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Balai Besar POM di Samarinda, sedangkan fungsi penyusunan standar tetap menjadi kewenangan pusat.

Selain fungsi pengawasan, Balai Besar POM di Samarinda juga melaksanakan layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta advokasi dan kerja sama lintas sektor dengan instansi pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat jejaring kolaborasi, meningkatkan kesadaran publik, dan memperluas jangkauan efektivitas sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda.

Kegiatan ini mencakup Rincian Output (RO) Prioritas Nasional sebagai berikut:

- Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, yang meliputi peningkatan ruang lingkup pengujian dan pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium;
- Penanganan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan di

BBPOM Samarinda, meliputi kegiatan operasi intelijen, operasi penindakan, pemberkasan, serta pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan (wasmalitrik);

- UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT meliputi kegiatan advokasi dan pendampingan UMKM;
- Sampel makanan yang diperiksa oleh UPT, meliputi pengadaan sampel dan pengujian laboratorium sampel makanan;
- Sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh UPT, meliputi pengadaan sampel dan pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan;
- Sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa oleh UPT meliputi kegiatan pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya;
- Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT meliputi kegiatan pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya;
- Sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang diperiksa oleh UPT, yang meliputi pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya serta pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana;
- Pengadaan alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, yang meliputi kegiatan pengadaan dalam rangka pemenuhan/ peremajaan alat laboratorium.

Seluruh rincian output tersebut menjadi bagian integral dari pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Besar POM di Samarinda dalam rangka menjamin mutu, keamanan, serta efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda.

B. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini mencakup Rincian Output (RO) sebagai berikut:

- Layanan BMN, yang meliputi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan
- Layanan Perkantoran, yang mencakup penyediaan dukungan operasional, pemeliharaan fasilitas, serta administrasi kepegawaian dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan.

Kegiatan ini berfokus pada upaya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja pegawai, serta pemeliharaan rutin sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Samarinda. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya dukungan sumber daya, fasilitas kerja, dan lingkungan operasional yang optimal dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Pengelolaan BMN dilakukan secara tertib, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Di sisi lain, pengelolaan belanja pegawai dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan dan motivasi kerja pegawai, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Selain itu, kegiatan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana dilakukan untuk menjaga ketersediaan fasilitas kerja yang layak, aman, dan berfungsi optimal, sehingga seluruh kegiatan teknis maupun administrasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kegiatan ini merupakan bagian penting dari dukungan manajemen yang berperan langsung dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- *Target Kinerja*
- *Kerangka Pendanaan*

IV.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai Besar POM di Samarinda menetapkan sasaran kegiatan, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja tahun 2025 – 2029

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK.1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**	90,75	91,75	92,75	93,75	94,75
	2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
	3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	80,60	80,80	81,00	81,20	81,50

	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	96	97	98	99
	8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
	9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	97,50	98,25	99,00	99,50
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,93	92,13	93,73	95,33	96,80
	12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
	13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
	14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,9	72,7	74,7	76,7	78,7
	15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43

	16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
SK.2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	**1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**	100	100	100	100	100
SK.3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi di wilayah kerja UPT	**1. Tingkat efektivitas KIE sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**	88,43	89,32	90,20	91,09	91,97
	2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	15	18	22	23
	3. Jumlah desa pangan aman	4	6	7	7	7
	4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
SK.4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	**1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau Izin Penerapan CPPOB Pangan Olahan**	15,96	34,04	53,19	74,47	96,81
SK.5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**	92,5	94	96	97	98

SK.6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	**1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar**	90	91	92	93	94
SK.7. Layanan Publik UPT yang Prima	**1. Indeks Pelayanan Publik UPT**	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9
SK.8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	**1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM**	88,69	89,14	89,59	90,04	90,49
	2. Nilai AKIP UPT BPOM	83,6	83,7	83,8	83,9	84
	3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
	4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7

IV.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kegiatan BBPOM di Samarinda periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Samarinda 2025-2029 Berdasarkan Program

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	19.915,9	27.829,7	30.871,0	33.979,7	37.226,2
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12.408,8	12.409,4	13.650,4	15.015,4	16.517,0
TOTAL	32.324,7	40.239,1	44.521,4	48.995,1	53.743,2

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Samarinda 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	31.107,2	39.021,6	43.303,8	47.777,6	52.525,7
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.217,5	1.217,5	1.217,5	1.217,5	1.217,5
TOTAL	32.324,7	40.239,1	44.521,4	48.995,1	53.743,2

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan BPOM dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategis BPOM yang ingin dicapai.

Matriks kinerja dan pendanaan Balai Besar POM di Samarinda per kegiatan tercantum dalam anak Lampiran 1.Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Samarinda.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen ini menjadi turunan langsung dari Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Renstra Balai Besar POM di Samarinda ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi yang selaras dengan Renstra Badan POM serta memperhatikan karakteristik, potensi, dan tantangan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Timur. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja menengah dan tahunan di lingkungan Balai Besar POM di Samarinda agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkesinambungan.

Untuk menjamin keterlaksanaan Renstra sesuai dengan target dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam perbaikan berkelanjutan, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengambilan keputusan strategis.

Renstra Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman kerja bagi seluruh pegawai dalam mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang semakin andal, transparan, dan

akuntabel. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Balai Besar POM di Samarinda siap berkontribusi aktif dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang terlindungi dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan serta mendukung pencapaian visi Badan POM menuju "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

BBPOM DI SAMARINDA

LAMPIRAN

- *Matriks Kinerja dan Pendanaan BBPOM di Samarinda*

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025-2029

Program/Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM A : Program Pengawasan Obat dan Makanan														
Kegiatan I : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									19.915,9	27.829,7	30.871,0	33.979,7	37.226,2	
	SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**												Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	90,75	91,75	92,75	93,75	94,75						
	IKSK 1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Provinsi Kalimantan Timur	26	27	28	29	30						
	IKSK 1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	91	92	93	94	95						
	IKSK 1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Provinsi Kalimantan Timur	100	100	100	100	100						
	IKSK 1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	91	92	93	94	95						
	IKSK 1.6	Persentase keputusan /rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Provinsi Kalimantan Timur	80,60	80,80	81,00	81,20	81,50						
	IKSK 1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	95	96	97	98	99						
	IKSK 1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	85	87	89	92	95						
	IKSK 1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	96,75	97,5	98,25	99	99,5						
	IKSK 1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	91	92	93	94	95						
	IKSK 1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	90,93	92,13	93,73	95,33	96,8						
	IKSK 1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Provinsi Kalimantan Timur	80	81	82	83	84						
	IKSK 1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Provinsi Kalimantan Timur	100	100	100	100	100						
	IKSK 1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Provinsi Kalimantan Timur	70,9	72,7	74,7	76,7	78,7						

	IKSK 1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Provinsi Kalimantan Timur	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43						
	IKSK 1.16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	-	81	82	83	84						
	OUTPUT													
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			45	45	45	45	45						
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			439	439	449	459	469						
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			948	956	1006	1059	1114						
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			37	45	48	51	57						
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			677	710	752	807	859						
	RO 6 : Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM			-	204	204	216	216						
	RO 7 : Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia			0	0	0	0	0						
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1						
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1						
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			0		396	396	396						
	SK 2	**Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**												Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	100	100	100	100	100						
	OUTPUT													
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			1	1	1	1	1						
	SK 3	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**												Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 3.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Provinsi Kalimantan Timur	88,43	89,32	90,2	91,09	91,97						
	IKSK 3.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Provinsi Kalimantan Timur	10	15	18	22	23						

	IKSK 3.3	Jumlah desa pangan aman	Provinsi Kalimantan Timur	4	6	7	7	7							
	IKSK 3.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Provinsi Kalimantan Timur	1	1	1	2	2							
	OUTPUT														
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			474	1000	1100	1210	1331							
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			23	12	13	14	15							
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			10	15	18	22	23							
	RO 4: Desa Pangan Aman			4	6	7	7	7							
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	1	1	2	2							
	SK 4	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**													Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 4.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Provinsi Kalimantan Timur	15,96	34,04	53,19	74,47	96,81							
	OUTPUT														
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			16	18	19	20	21							
	SK 5	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**													Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 5.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Provinsi Kalimantan Timur	92,5	94	96	97	98							
	OUTPUT														
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			5	5	5	5	5							
	SK 6	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**													Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 6.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Provinsi Kalimantan Timur	90	91	92	93	94							
	OUTPUT														
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15							

	SK 7	**Layanan Publik UPT yang prima**												Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 7.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Provinsi Kalimantan Timur	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						
	OUTPUT													
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			237	366	366	370	384						
	SK 8	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**												Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 8.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Provinsi Kalimantan Timur	88,69	89,14	89,59	90,04	90,49						
	IKSK 8.2	Nilai AKIP UPT BPOM	Provinsi Kalimantan Timur	83,6	83,7	83,8	83,9	84						
	IKSK 8.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Provinsi Kalimantan Timur	5	5	5	5	5						
	IKSK 8.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Provinsi Kalimantan Timur	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7						
	OUTPUT													
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1						
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1	1	1	1	1						
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			16	47	45	43	41						
PROGRAM B : Program Dukungan Manajemen														
Kegiatan II : Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									12.408,8	12.409,4	13.650,4	15.015,4	16.517,0	
	RO 4 : Layanan BMN			1	1	1	1	1						
	RO 5 : Layanan Perkantoran			1	1	1	1	1						